

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MALANG
2017-2018**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

**Yousi Novita Pratiwi
145120600111026**



**PEMINATAN INOVASI PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MALANG
2017-2018**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Yousi Novita Pratiwi

145120600111026

Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. George Towar Ikbal T, S.IP., M.Si
NIK. 20100851111101

Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si
NIK. 20130411042001

LEMBAR PENGESAHAN

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MALANG
2017-2018**

SKRIPSI

Disusun oleh:

**Yousi Novita Pratiwi
145120600111026**

**Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan
pada tanggal 18 Desember 2018**

Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

**Tia Subekti, S.IP., MA
NIP. 199206202018032001
Anggota Majelis Penguji 1**

**Dr. Ali Maksum, M.Ag., M.Si
NIP. 197003041995031002
Anggota Majelis Penguji 2**

**Dr. George Towar Ikbal T, S.IP., M.Si
NIK. 20100851111101**

**Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si
NIK. 20130411042001**

Malang, 18 Desember 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si.Ak
NIP. 196908141994021001**

PERNYATAAN

Nama : Yousi Novita Pratiwi

NIM : 145120600111026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang 2017-2018” adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam lembar Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 18 Desember 2018
Yang Memberi Pernyataan,

Yousi Novita Pratiwi
145120600111026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Strata 1 (satu) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang, yaitu Skripsi. Penulis dalam menyelesaikan skripsi berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang 2017-2018” ini tentunya mendapat masukan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. untuk itu perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya dan anugerah sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan PKN ini.
2. Ibu Hesti Sri Wahyuni, Bapak Muhammad Yasin dan Ibu Rr. Etty Arini Sri Rahayu, Mama-Papa dan Niniku tercinta, yang tiada henti mendoakan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta Adikku, Raditya Mayzalino yang selalu mendukung dan menghibur selama proses pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Joko Purnomo, S.IP., MA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah memberikan bantuan kritik dan masukan sehingga proses pengerjaan skripsi ini bisa berjalan dengan lancar.
4. Bapak Dr. George Towar Ikbil Tawakkal, S.IP., M.Si. dan Ibu Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak sekali pelajaran, bimbingan dan arahan dari sebelum proses pengerjaan Skripsi dilakukan, hingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Tia Subekti, S.IP., MA. dan Bapak Dr. Ali Maksum, M.Ag., M.Si., selaku dosen penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan arahan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang Bapak Farid Junaedi Bc.IP., S.Sos., MH., beserta jajarannya yang telah mengizinkan untuk melaksanakan penelitian untuk pengerjaan Skripsi ini di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang.
7. Bapak-bapak petugas di Bidang Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang Pak Kusdaryanto, Pak Gatot Pratomo, Pak Nawawi, Pak Yulius, dan Pak Ahmad Efendi yang sudah saya repotkan selama penulisan skripsi ini
8. Seluruh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang, yang telah banyak membantu saya selama penulis berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang.
9. Seluruh warga binaan di Lembaga pemasyarakatan Klas 1 Malang yang juga telah membantu dan menerima saya dengan baik ketika penulis berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang.
10. Wulan Six, Aulia Zahrah, Vivi Olinda, Erina Hastuti, Devi Astari, Vera Widiawati, Adam Jamal, Irfan Fajri, Pradhana Citta, Baladhika Puji, Shanisa Ulya, Amallia Dwi, teman-teman yang dengan kebaikan dan ketabahan hatinya telah “mensponsori” saya dan skripsi ini.
11. Teman-teman mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang juga turut membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan yang terkait. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapkan untuk perbaikan penulisan selanjutnya.

Malang, 18 Desember 2018

Penulis

Yousi Novita Pratiwi

ABSTRAK

Yousi Novita Pratiwi. (2018). Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang 2017-2018. Tim Pembimbing: Dr. George Towar Ikbal Tawakkal, S.IP., M.Si dan Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si.

Diawali dengan permasalahan mengenai angka kriminalitas di Indonesia yang semakin meningkat dan perilaku *labeling* yang sering dilakukan terhadap narapidana dan mantan narapidana membuat semakin pentingnya peran Lapas. Sangat penting bagi narapidana untuk mendapatkan keterampilan yang dibina oleh Lapas melalui Pembinaan Kemandirian. Namun kasus pada Lapas Klas 1 Malang, peserta dari Pembinaan Kemandirian tidak lebih dari sepersepuluh dari jumlah narapidana keseluruhan narapidana pada Lapas tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teori evaluasi milik Daniel Stufflebeam yaitu Evaluasi CIPP yaitu *context, input, process, product*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengatakan, pada *context* diketahui tujuan Pembinaan Kemandirian sesuai dengan petunjuk pelaksanaan adalah keberhasilan narapidana untuk mengembalikan jati dirinya dan memperoleh keterampilan dari kegiatan kerja yang dilakukan. *Input* yang dipersiapkan dalam pelaksanaan adalah rencana kerja, anggaran dana, intervensi dengan pihak ketiga, narapidana, dan metode pendekatan terhadap narapidana. Pada *process* mengatakan bahwa rencana kerja dan petunjuk pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan, penggunaan anggaran dana belum maksimal, intervensi dengan pihak ketiga sudah dilaksanakan, persiapan narapidana sudah dilakukan tetapi yang mengikuti kegiatan hanya sedikit, persiapan petugas belum maksimal, metode pendekatan terhadap narapidana yang ditentukan pada petunjuk pelaksanaan belum maksimal namun narapidana menerima dengan baik. Pada *product* dijelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan kegiatan dan terdapat pula hal-hal yang masih belum sesuai dengan tujuan. Dengan demikian mengingat Pembinaan Kemandirian merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan di setiap Lapas maka Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang tetap dilaksanakan namun dengan beberapa hal yang perlu diperbaiki agar lebih maksimal pelaksanaannya.

Kata kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembinaan Kemandirian*

ABSTRACT

Yousi Novita Pratiwi. (2018). Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University Malang. Evaluation of the Implementation of Pembinaan Kemandirian to Prisoners at Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang 2017-2018. Advisory Team: Dr. George Towar Ikkal Tawakkal, S.IP., M.Si and Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si.

This study begins by the increasing crime rate in Indonesia and labeling of behavior that is often done to prisoners and ex-prisoners makes the role of Lapas become more important. It is very important for prisoners to acquire skills that are fostered by Lapas through Pembinaan Kemandirian or developing self-reliance to the prisoners. Considering the importance of Independent Development, participants from Pembinaan Kemandirian in Lapas Klas 1 Malang were no more than one-tenth of the total prisoners in prison. This descriptive qualitative study uses Daniel Stufflebeam's CIPP Evaluation (context, input, process, product evaluation). The results of the study said, in the context it was known that the objective of Independent Development in accordance with the implementation guidelines was the success of prisoners to return to their identity and obtain skills from the work activities carried out. Inputs that prepared are work plans, funds, interventions, prisoners, and methods of approaching prisoners. The process said that the work plan and implementation guidelines had been implemented, the use of the budget was not maximal, intervention with third parties had been carried out, preparation of prisoners had been carried out but only a few were involved, preparation of officers was not maximal, methods of approaching prisoners were determined the implementation has not been maximal but the prisoners received it well. In the product it is explained that there are several things that have been implemented that are in accordance with the objectives of the activity and there are also things that are still not in accordance with the objectives. Thus, considering that Pembinaan Kemandirian is an activity that must be carried out in each Lapas, the Pembinaan Kemandirian in Lapas Klas 1 Malang is still carried out but with several things that need to be improved so that the implementation become more maximal.

Keywords: Penitentiary, Prisoners, Pembinaan Kemandirian

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian teori.....	23
2.2.1 Teori Evaluasi	23
2.2.1.1 Pengertian Evaluasi	23
2.2.1.2 Model Evaluasi CIPP	26
2.2.2 Pemasyarakatan.....	29
2.2.2.1 Pengertian Pemasyarakatan.....	29
2.2.2.2 Pembinaan Kemandirian Narapidana.....	31
2.3 Alur pikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Fokus Penelitian	35
3.3 Jenis Data	36
3.3.1 Data Primer	36
3.3.2 Data Sekunder	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4.1 Wawancara.....	37
3.4.2 Dokumentasi	39
3.5 Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MALANG	42
4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang.....	42
4.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang	44
4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang	45
4.4 Gambaran Umum Pola Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang	49
BAB V EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MALANG	53
5.1 <i>Context Evaluation</i>	54
5.2 <i>Input Evaluation</i>	62
5.3 <i>Process Evaluation</i>	69
5.4 <i>ProductEvaluation</i>	86
BAB VI PENUTUP	94
6.1 Kesimpulan	94
6.2 Rekomendasi	96

DAFTAR PUSTAKA	98
----------------------	----

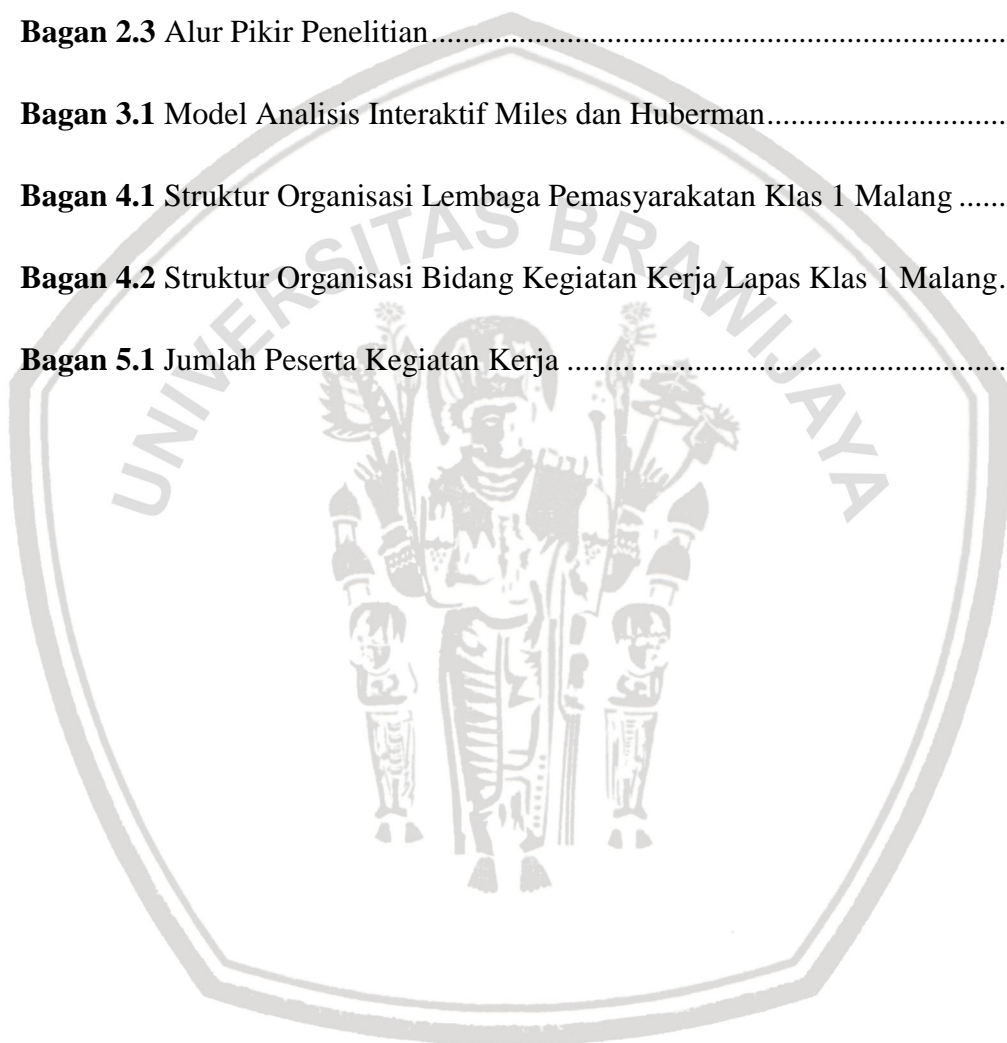


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kriminal di Indonesia 2014-2016	1
Tabel 1.2 Kegiatan Bimbingan Kerja di Lapas Klas 1 Malang.....	7
Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Ini.....	19
Tabel 3.1 Data Informan atau Narasumber	38
Tabel 4.1 Blok Narapidana di Lapas Klas 1 Malang.....	43
Tabel 4.2 Unit Kerja yang Dilaksanakan oleh Bidang Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang.....	52
Tabel 5.1 Peraturan Hukum Dasar Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian	55
Tabel 5.2 Rencana Kerja Bidang Kegiatan Kerja 2017-2018	63
Tabel 5.3 Jenis Keterampilan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakikman 1990	71

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Peningkatan Jumlah Narapidana pada tahun 2017.....	2
Bagan 2.1 Gambaran Evaluasi	25
Bagan 2.2 Komponen Evaluasi CIPP	27
Bagan 2.3 Alur Pikir Penelitian.....	34
Bagan 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	40
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang	46
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Bidang Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang.....	50
Bagan 5.1 Jumlah Peserta Kegiatan Kerja	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Unit Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang.....	70
Gambar 5.2 Suasana Pelatihan dari BLKI Singosari.....	76
Gambar 5.3 Pembukaan dan Pelatihan Membatik dari UKM Batik Blimbing Malang	77



DAFTAR ISTILAH

AO	: Admisi Orientasi, Tahap awal pembinaan dalam pemasyarakatan sebagai kegiatan pengenalan kehidupan Lapas kepada narapidana
Asesmen psikologi	: Dilakukan oleh psikolog Lapas untuk mengumpulkan informasi mengenai karakter narapidana untuk dijadikan pedoman dalam menentukan kegiatan narapidana
Asimilasi	: Tahap lanjutan pembinaan dalam pemasyarakatan, dimana narapidana mulai dibaurkan dengan masyarakat dalam pengawasan Lapas
Bimker	: Bimbingan Kerja, Seksi Pengelola Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang
CB	: Cuti Bersyarat
CMB	: Cuti Menjelang Bebas
Dana DIPA	: Dana berasal dari kementerian untuk pelaksanaan kegiatan di Lapas
Ditjenpas	: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Klas	: Sebutan klasifikasi Lapas berdasarkan kapasitas, tempat

	kedudukan dan kegiatan kerja
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
Narapidana	: Warga Binaan Pemasyarakatan yang dibina di dalam Lapas
PB	: Pembebasan Bersyarat
Pertanian Dalam	: Unit kerja pertanian yang terletak di dalam kawasan Lapas
Pertanian Lengkong	: Unit kerja pertanian yang terletak mengelilingi Lapas dalam
Pertanian Terbuka	: Unit kerja pertanian yang terletak di Lapas Terbuka
Remisi	: Pengurangan masa tahanan
Residivis	: Orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
Unit Kerja	: Sebutan untuk jenis bimbingan kerja narapidana di Lapas
UPT	: Singkatan dari Unit Pelaksana Teknis, yaitu organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu dengan kewenangan

mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukan terpisah dari organisasi induknya

WBP : Warga Binaan Pemasyarakatan, terdiri dari Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang membutuhkan strategi tersendiri untuk menanganinya. Tindakan kriminal merupakan tindakan yang sangat meresahkan masyarakat, karena selain sang pelaku melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang di negara Indonesia, ia juga melanggar hak dari korbannya, bahkan ia juga telah melanggar nilai dan norma yang telah dianut di masyarakat. Negara di seluruh belahan dunia menghadapi dan berusaha untuk menangani dan memberantas permasalahan sosial ini, yang salah satunya adalah Indonesia. Hingga tahun 2016 telah tercatat angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia meningkat mencapai ratusan ribu.¹ Jumlah kejahatan di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016 berdasarkan Statistik Kriminal 2017 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kriminal di Indonesia 2014-2016

Jenis Kejahatan	Tahun		
	2014	2015	2016
Menghilangkan Nyawa	1.227	1.491	1.292
Kejahatan Terhadap Fisik	46.366	47.128	46.706
Melanggar Kesusilaan	5.499	5.051	5.247
Menghilangkan Kemerdekaan Seseorang	1.954	2.212	2.885

¹ Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, 2017, Statistik Kriminal 2017, Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm 41

Mengambil Hak Milik/Barang dengan Kekerasan	11.758	11.856	12.095
Mengambil Hak Milik/Barang	117.751	114.013	120.026
Narkotika dan Psikotropika	19.280	36.874	39.171
Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	48.608	54.115	49.198
Melanggar Ketertiban Umum	4.519	4.227	4.297
Jumlah	256.962	276.967	280.917

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri dalam Statistik Kriminal 2017, 2017

Peningkatan angka kriminalitas juga dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga pelaksana sistem pemasyarakatan. Berikut ini merupakan angka peningkatan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2017:

Bagan 1.1



Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data KPLP Lapas Klas 1 Malang, 2018

Bagan di atas menjelaskan bahwa setiap bulan selalu terdapat peningkatan pada jumlah narapidana dengan jumlah rata-rata peningkatan sebesar 175 setiap bulannya pada tahun 2017. Hal ini semakin membuktikan bahwa angka

kejahatan semakin meningkat sehingga peran dari Masyarakat untuk memperbaiki moral dengan pembinaan dan bimbingannya semakin diperlukan di Indonesia.

Setelah pelanggaran yang telah dilakukan, pelaku kejahatan tentunya akan ditetapkan hukumannya sesuai jenis dan tingkat kasus kriminal yang dilakukannya berdasarkan hukum pidana. Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, salah satunya adalah penjara. Hukuman penjara saat ini, bukan lagi hukuman dimana negara memberikan penjaran terhadap para pelaku kriminal tersebut. Sejak tahun 1964, sistem penjara diganti dengan sistem masyarakat berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Masyarakat Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.²

Sistem Masyarakat tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, yang didalamnya tercantum bagaimana kegiatan masyarakat dilaksanakan terhadap Warga Binaan Masyarakat (WBP) mulai dari pendataan awal, hak dan kewajiban, kegiatan pembinaan, keringanan hukuman, hingga masa integrasi dengan masyarakat. Sistem Masyarakat sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 adalah

...tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Masyarakat berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat. Dalam penjelasan Bagian Umum.

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³

Dalam pelaksanaannya, pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian pembinaan lanjutan dalam berintegrasi dengan masyarakat seperti cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat, akan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. Kedua lembaga inti dalam sistem pemasyarakatan ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Hukum dan HAM tepatnya pada Ditjen Pemasyarakatan.

Sesuai dengan tujuan pemasyarakatan untuk mengubah perilaku seorang kriminal menjadi pribadi yang berperilaku baik sesuai dengan nilai, norma dan juga hukum yang berlaku di Indonesia, pembinaan di dalam Lapas dilakukan dalam dua bentuk pola pembinaan. Pola pembinaan tersebut, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, wajib dilaksanakan di setiap Lapas di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan Narapidana. Keduanya bertujuan untuk membentuk *softskill* dan *hardskill* yang mana keduanya saling berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam membentuk *softskill* pembinaannya berupa pembinaan perilaku dalam pola pembinaan kepribadian dan *hardskill* yang berupa membina keterampilan dalam pola pembinaan kepribadian.

Kedua pola pembinaan tersebut akan menjadi kegiatan keseharian yang akan dilakukan oleh setiap narapidana selama menjalani masa pidananya yang akan dibimbing oleh para petugas Lapas. Mengingat jumlah kasus kejahatan yang

³ *Ibid.* Pasal 1 ayat 2

terjadi di Indonesia yang mencapai angka dua ratus ribu, dapat dibayangkan bagaimana pentingnya sebuah pembinaan dilaksanakan dalam masyarakat untuk mengarahkan dan mengembalikan dan memperbaiki kepribadian pelaku agar dapat diterima kembali di masyarakat.

Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang dilaksanakan untuk membina sekaligus memberikan pembekalan keterampilan dan melatih kemampuan kerja bagi para narapidana dan tidak kalah penting dari pembinaan kepribadian yang mengajarkan meliputi akhlak dan budi pekerti narapidana. Pola pembinaan kemandirian ini dilaksanakan dalam Kegiatan Bimbingan Kerja yang terdiri dari unit-unit kerja yang ada di dalam Lapas. Pembinaan ini tentunya akan sangat baik bagi masa depan narapidana setelah ia dibebaskan. Mengingat adanya *labelling* yang diberikan oleh masyarakat bahkan pemerintah terhadap seorang mantan narapidana. *Labelling* ini merupakan sikap dari masyarakat yang seakan memberikan label tersendiri terhadap narapidana maupun mantan narapidana yang membuat narapidana maupun mantan narapidana seakan terdiskriminasi oleh masyarakat karena statusnya sebagai narapidana atau mantan narapidana.

Salah satu contoh perilaku *labeling* adalah, seperti adanya persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada saat melamar pekerjaan. Hal ini seakan mantan narapidana tidak dipercaya lagi karena masa lalunya yang pernah berbuat kesalahan dan telah tertutup kesempatannya untuk mencari lapangan pekerjaan. Perilaku *labelling* membuat banyak dari mereka kesulitan untuk beradaptasi dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kesulitan ini juga berdampak pada bidang ekonomi dimana mantan napi akan kesulitan dalam

mencari pekerjaan.⁴ Pembinaan kemandirian ini akan mempermudah narapidana dalam hal pekerjaan tanpa harus bergantung pada masyarakat dengan bekal keterampilan yang telah ia dapatkan selama berada di Lapas. Seorang mantan narapidana dapat menggunakan ilmu yang telah diberikan oleh petugas dalam bimbingan kerja sesuai dengan unit yang ia ikuti untuk bekerja.

Pola pembinaan kemandirian dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kerja di dalam Lapas. Selain menambah keterampilan bagi narapidana untuk dijadikan bekal kedepannya setelah bebas, kegiatan ini nyatanya juga bermanfaat bagi narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang dikatakan oleh Eko salah seorang narapidana yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja, “Di luar dulu kan kerja, jadi gaenak kalau disini nganggur. Dulu kerjanya satu bidang dengan sekarang.”⁵ Pembinaan kemandirian selain menambah wawasan dan keterampilan juga membuat narapidana memiliki kegiatan untuk dilakukan untuk mengisi waktu luang. Narapidana lain, Ibrohim yang mengikuti kegiatan pembuatan keset juga mengatakan bahwa pekerja mendapatkan premi sebesar 20% dari hasil penjualan produk.⁶

Di tiap-tiap Lapas yang ada di Indonesia, kegiatan kerja dilaksanakan dalam unit-unit bimbingan kerja yang biasa disebut dengan unit kerja. Unit-unit kerja tersebut dapat disesuaikan dengan tingkat klas dari sebuah Lembaga Pemasyarakatan, jenis ataupun gender dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang

⁴ Muyasaroh dan Pambudi Handoyo, 2014, *Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran atau Pencuri*, Jurnal Paradigma, Vol. 2, No. 3, hlm. 5

⁵ Wawancara dengan Eko, narapidana yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30

⁶ Wawancara dengan Ibrohim, narapidana yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.40

tinggal di dalam Lapas. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang atau yang sering disebut dengan Lapas Lowokwaru telah dilaksanakan 12 unit bimbingan kerja yang disesuaikan dengan penghuni yang keseluruhan adalah laki-laki.

Tabel 1.2

Tabel Kegiatan Bimbingan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang

No.	Jenis Bimbingan Kerja	Jenis Keterampilan
1.	Unit Keset	Pembuatan keset
2.	Unit Jamur	Budidaya jamur
3.	Unit Sablon	Sablon kaos
4.	Unit Bengkel	Perbengkelan dan las
5.	Unit Kerajinan Tangan	Pembuatan kerajinan dari kayu
6.	Unit Mebel	Pembuatan perabotan rumah tangga
7.	Unit Ulat Hongkong	Budidaya ulat dan jangkrik
8.	Unit Pertanian dalam dan Lengkong	Pertanian sayuran
9.	Unit Hortikultura	Pertanian buah-buahan
10.	Unit Pertanian Terbuka Ngajum	Pertanian sayur bagi WBP yang sedang dalam tahap asimilasi
11.	Unit Menjahit	Menjahit pakaian
12.	Unit Pembuatan Tempe	Pembuatan Tempe

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat unit-unit kerja yang dilaksanakan di Lapas Klas 1 Malang juga disesuaikan untuk narapidana. Unit kerja yang ada memudahkan narapidana untuk berwirausaha dengan keterampilan yang diberikan di unit kerja. Hal ini mendukung narapidana untuk memulai kehidupannya setelah bebas dari segi perekonomian.

Lapas Klas I Malang sendiri memiliki lahan untuk pelaksanaan pembinaan kemandirian yang terpisah dari wilayah Lapas Klas I Malang, tepatnya pada unit

kerja pertanian di pondok asimilasi Ngajum. Narapidana di pondok asimilasi tersebut diberikan pembinaan kemandirian berupa keterampilan bertani dan berternak untuk memanfaatkan lahan yang luas. Pondok asimilasi Ngajum memiliki lahan seluas 20 hektare. Pondok asimilasi ini merupakan bagian dari Lapas Kelas 1 Lowokwaru di Desa Maguan, Kecamatan Ngajum.⁷ Pada awalnya, lahan tersebut merupakan pondok asimilasi bagi narapidana Lapas Klas I Malang terpilih yang berperilaku baik dan menjelang masa bebas, dan saat ini sedang diwacanakan untuk menjadi Lapas Wisata.

Seperti yang telah disebutkan, pembinaan terhadap narapidana dilakukan oleh Lapas sebagai UPT dari kebijakan dari pemerintah pusat tepatnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai pelaksana teknis, metode pelaksanaan kebijakan pembinaan ini diserahkan kepada Lapas yang menangani narapidana dan tentunya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Lapas. Dengan metode pelaksanaan yang berbeda, maka permasalahan-permasalahan yang tentunya akan berbeda satu sama lain.

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang ini tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan kerja. Narapidana akan mengikuti kegiatan kerja ini sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Seperti yang dikatakan oleh Ibrohim seorang pekerja di unit kerja pembuatan keset yang mengikuti kegiatan tersebut atas dasar keinginannya sendiri. Ibrohim mengatakan beberapa

⁷ Malangtimes.com, 2017, *Wacanakan Jadi Lapas Wisata, Pondok Asimilasi Ngajum Berbenah* <http://www.malangtimes.com/baca/18177/20170425/144510/wacanakan-jadi-lapas-wisata-pondok-asimilasi-ngajum-berbenah/>, Diakses pada 23 Mei 2018, pukul 09.30.

alasan mengapa ia berminat mengikuti kegiatan pembatan keset, “karena kegiatannya yang *simple*, santai dan tidak *ribet*, bahan-bahan tidak perlu beli karena sudah tersedia, ada kesibukan dan dapat premi sekitar 20% dari penjualan.” Hal serupa juga dikatakan oleh Bagus, pekerja di unit kerja kerajinan tangan, bahwa ia juga berminat dari diri sendiri untuk mengikuti kegiatan kerja.

Namun kekurangan atau permasalahan yang dialami oleh Lapas Klas 1 Malang pada pelaksanaan kegiatan kerja ini adalah jumlah peminat kegiatan kerja. Narapidana yang mengikuti kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang ini tergolong sangat minim. Dari jumlah penghuni yang mengalami *overcapacity* mencapai lebih dari 2000 penghuni, narapidana yang mengikuti kegiatan kerja keseluruhan hanya 135 orang saja. Angka tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah penghuni lapas yang mencapai angka ribuan.

Terlebih bahwa Lapas Klas 1 Malang ini menyandang predikat sebagai *role model* Lembaga pemasyarakatan se-Indonesia yang diberikan oleh Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.⁸ Dengan adanya predikat yang didapatkan pada tahun 2015 tersebut, seharusnya Lapas harus melakukan segala kegiatannya secara maksimal untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menjadikan narapidana sebagai orang yang tidak akan mengulangi kesalahan dan menjadi warga negara yang baik. Tanpa terkecuali pelaksanaan kegiatan kerja narapidana karena kegiatan kerja ini akan sangat bermanfaat bukan hanya bagi narapidana tapi juga bagi Indonesia. Karena secara tidak langsung, pelatihan yang

⁸ Malangtimes.com, 2015, *Prestasi Lapas Lowokwaru Jadi Motivasi Pemimpin Baru*, <http://m.malangtimes.com/baca/6082/20151109/192045/prestasi-lapas-lowokwaru-jadi-motivasi-pemimpin-baru/> Diakses pada 2 Januari 2018, jam 15.00

dilaksanakan dalam pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas, turut meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia.

Dengan mengangkat permasalahan tersebut, penulis mengambil judul penelitian “*Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang*”. Karena hal tersebut perlu untuk dikaji kendala-kendala dan faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut. Serta dapat diukur sejauh mana pencapaian tujuan dari pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Klas 1 Malang. Dengan mengetahui *progress* yang telah dicapai oleh Lapas Klas 1 Malang, dapat diketahui pula langkah apa yang selanjutnya akan diambil untuk mencapai tujuan dari pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- Bagaimana evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Mengetahui evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Pada poin ini dijelaskan manfaat penelitian ini secara teoritis dan juga praktis, yakni sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan juga sebagai kajian yang lain dalam pemanfaatan teori evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) milik Daniel L. Stufflebeam untuk mengevaluasi kegiatan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya kegiatan Pembinaan Kemandirian.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, dari penulisan laporan ini dapat menambah pengetahuan mengenai kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan. Serta dapat mengetahui bagaimana sebuah kebijakan dari pemerintah dilaksanakan pada sebuah Unit Pelaksana Teknis
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang, tulisan ini dapat dijadikan referensi dan juga masukan untuk lebih meningkatkan kualitas kegiatan pemasyarakatan, khususnya pada kegiatan pembinaan kemandirian terhadap narapidana agar lebih baik untuk kedepannya

3. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan, menambah kajian mengenai pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
4. Bagi masyarakat, tulisan ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya kegiatan pembinaan kemandirian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menguji orisinalitas dan juga sebagai rujukan penulis dalam melaksanakan penelitian, penulis akan menyajikan ringkasan dari penelitian terdahulu, serta membandingkan penelitian yang dilakukan penulis ini dengan penelitian-penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya yang dilaksanakan oleh peneliti yang lain. *Pertama*, Ni Made Destriana Alviani dengan judul skripsi *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar*. Lingkup permasalahan yang diambil pada penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, juga faktor-faktor hambatan yang terjadi. Penelitian ini menganalisa dengan konsep efektivitas hukum dan menggunakan jenis penelitian empiris yuridis yaitu membandingkan produk hukum dengan kenyataan yang ada.

Pembinaan narapidana dilaksanakan dalam sebuah sarana pembinaan yang disebut dengan bengkel kerja. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan tahapan yaitu tahap pembinaan, asimilasi dan integrasi. Pembinaan narapidana dilaksanakan dengan menggunakan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kendala yang ada dalam pelaksanaannya yaitu narapidana yang tidak bersedia untuk mengikuti pembinaan yang telah diprogramkan di Lapas, kurang tenaga kerja dan keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan.

Kesimpulannya adalah pembinaan di Lapas Klas IIA Denpasar kurang berjalan maksimal karena dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada.¹

Kedua, penelitian skripsi yang ditulis oleh Sartika Budi A dengan judul *Evaluasi Model Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang*. Penelitian ini mengambil permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai evaluasi model pembinaan narapidana dan juga hambatan-hambatan serta upaya untuk mengatasinya. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi CIPP.

Hasil dari penelitian ini yaitu model pembinaan narapidana menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pendekatan dari atas (*top down approach*) digunakan untuk memberikan pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) digunakan untuk memberikan pembinaan kemandirian. Menurut pendapat narapidana, dalam mengikuti pembinaan narapidana khususnya pembinaan keterampilan sangat bermanfaat karena mendapatkan bekal keterampilan yang dapat digunakan setelah bebas.

Pun dijelaskan faktor yang menghambat proses pembinaan di Lapas Klas IIA Wanita Semarang. Diantaranya latar belakang narapidana wanita yang berbeda-beda, hubungan personal sesama narapidana maupun dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta

¹ Ni Made Destriana Alviani, 2015, *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar*, Skripsi, Universitas Udayana

anggaran dana yang kurang memadai. Efektifitas pembinaan akan dikembalikan lagi kepada pribadi narapidana yang bersangkutan.²

Selanjutnya adalah skripsi berjudul *Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIA Jakarta*. Skripsi yang ditulis oleh Putri Anisa Yuliani ini mengambil fokus permasalahan mengenai pelaksanaan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIA Jakarta. Dengan kondisinya yang merupakan Lapas Terbuka, dimana narapidana dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, membuat program program pembinaan yang dilaksanakan berbeda dengan Lapas pada umumnya.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu program pembinaan kemandirian di Lapas Terbuka Klas II A Jakarta dilaksanakan secara *Top Down Approach*. Dimana WBP melaksanakan program pembinaan yang telah diadakan oleh pihak Lapas sebelumnya. Program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan yaitu budidaya cacing, peternakan ayam, pertukangan, perikanan dan P3 yaitu di penyulingan air (napi berkerja pada pihak ke 3 yaitu masyarakat di luar Lapas). Hambatan yang ditemui dalam pembinaan kemandirian di Lapas terkait yaitu kurangnya anggaran dana, kurangnya program pembinaan, kurangnya kemitraan, kurangnya minat narapidana, kurang sumber daya manusia atau petugas.³

² Sartika Budi A, 2013, *Evaluasi Model Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang

³ Putri Anisa Yuliani, 2014, *Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIA Jakarta*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta

Penelitian selanjutnya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Penelitian skripsi dari Firanda Rahmadika ini meneliti tentang pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana menggunakan teori implementasi kebijakan dan konsep panopticon disiplin. Pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas 1 Malang dilaksanakan sesuai dengan keputusan menteri yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Namun pelaksanaan pembinaan tersebut masih terhambat oleh beberapa hal misalnya seperti kurangnya petugas yang membina karena adanya *overcapacity* penghuni dan juga belum ada penanganan khusus terhadap narapidana residivis yang disebut “Penjahat Kambuhan” yang perlu pembinaan tersendiri.⁴

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah berasal dari Jurnal Administrasi Publik oleh Esti Hartyanti Putri, Moch. Saleh Soeady, Ainul Hayat, yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Peremajaan Angkutan Kota Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)*. Penulis melaksanakan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan mengenai peremajaan angkutan umum di Kota Malang. Peremajaan ini dilakukan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas dari angkutan umum kota sebagai sarana publik dan juga pelayanan publik. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa kebijakan peremajaan angkutan umum yang telah dilaksanakan, membawa dampak positif terhadap masyarakat karena dapat terciptanya keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Namun meskipun demikian kebijakan peremajaan angkutan kota ini belum efektif

⁴ Firanda Rahmadika, 2016, *Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana (Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang)*, Skripsi, FISIP Universitas Brawijaya.

dari sisi pemilik angkutan kota. Hal ini terlihat dari kurangnya respon dari pemilik angkutan kota untuk melakukan peremajaan.⁵

Penelitian selanjutnya merupakan skripsi yang ditulis oleh Yossy Herma Panjaya tahun 2011, *Evaluasi Program Raskin di Kota Semarang (Studi Kasus : Di Kelurahan Pedurungan Kidul)*. Penelitian ini mengambil fokus permasalahan dimana penanggulangan kemiskinan dalam paradigma pembangunan ekonomi merupakan tuntutan bagi pemerintah untuk mengadakan kebijakan-kebijakan pro terhadap masyarakat miskin yang salah satu yang telah dilaksanakan yaitu RASKIN. Tujuan penelitian ini adalah melihat ketepatan sasaran, efektivitas program dan besarnya kontribusi dari program RASKIN ini di Kelurahan Pedurungan Kidul dalam menanggulangi kemiskinan. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian yaitu mengenai kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif.⁶

Ketepatan sasaran dari program ini dalam kriteria baik karena Rumah Tangga Miskin telah menerima beras RASKIN dan merasa puas dengan kualitas beras yang diterima. Dari sisi efektivitas, program RASKIN yang dilaksanakan termasuk dalam kriteria baik alasannya jumlah beras yang dibagikan telah sesuai dengan ketentuan. Kontribusi Program RASKIN termasuk dalam kriteria sedang faktanya bantuan beras RASKIN yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul cukup memenuhi kebutuhan makan Rumah Tangga Miskin selama sebulan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan yaitu

⁵ Esti Hartiyanti Putri, Moch. Saleh Soeady, Ainul Hayat, *Evaluasi Kebijakan Peremajaan Angkutan Kota Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.3, No.1

⁶ Yossy Herma, 2011, *Evaluasi Program Raskin di Kota Semarang (Studi Kasus : Di Kelurahan Pedurungan Kidul)*, Skripsi, Universitas Diponegoro

pembayaran beras oleh Rumah Tangga Miskin yang terkadang kurang tertib dan tepat waktu.

Ketujuh, merupakan skripsi yang ditulis oleh Ernawati yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza BandarJaya, Lampung Tengah*. Pasar tradisional Plaza Bandar Jaya merupakan pasar yang dibangun atas nama pemerintah daerah tetapi belum ditetapkan peraturan yang secara khusus mengatur pengelolaannya. Plaza ini sempat dihadapkan dengan masalah yang tak kunjung diatasi meskipun telah berdiri lebih dari 15 tahun. Tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu mengenai kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik dengan kriteria Dunn, juga tinjauan mengenai tata kelola pasar. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.⁷

Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa pelaksanaannya belum efektif, hal ini terlihat dari poin utama dalam kebijakan yang belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan juga belum efisien karena kekurangan SDM yang mengelola pasar. Dalam hal kecukupan mengenai pelaksanaan tata kelola, dikatakan belum memenuhi kecukupan, namun masyarakat telah merasa tercukupi kebutuhannya dengan pengelolaan yang ada. Dari sisi responsivitas, masyarakat merepon dengan baik dari dibangunnya plaza ini dan pengelolaannya sudah cukup baik.

⁷ Ernawati, 2016, *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza BandarJaya, Lampung Tengah*, Skripsi, Universitas Lampung

Tabel 2.1

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

Judul Penelitian	Deskripsi Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
Skripsi Ni Made Destriana Alviani, 2015, <i>Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar</i>	Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Denpasar. Penulis menjabarkan efektivitas kegiatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Denpasar dengan menjelaskan tentang bagaimana kesesuaian antara peraturan hukum dengan kenyataan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Klas II A Denpasar. Tinjauan pustaka dalam penelitian yaitu efektivitas hukum. Berdasarkan penelitian ini, metode yang digunakan adalah empiris yuridis	Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Fokus penelitian oleh Ni Made Alviani tersebut bagaimana kesesuaian antara kenyataan pada pelaksanaan pembinaan narapidana secara umum dengan hukum perundang-undangan yang mengatur. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bagaimana evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan.
Skripsi Sartika Budi A., 2013, <i>Evaluasi Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang</i>	Lokasi pelaksanaan penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Semarang. Fokus penelitian adalah mengetahui pelaksanaan dan mengevaluasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Semarang. Penelitian tersebut menggunakan	Perbedaan yang pertama adalah lokasi penelitian. Selain itu penelitian tersebut mengevaluasi pelaksanaan pembinaan narapidana secara umum, sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai evaluasi pelaksanaan pembinaan yang lebih mengerucut pada pembinaan kemandirian di Lapas Klas 1 Malang.

	teori Evaluasi CIPP dalam menjabarkan permasalahan dalam penelitian serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	
Skripsi Putri Anisa Yuliani, 2014, <i>Program Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan terbuka Klas II A Jakarta</i>	Lokasi penelitian yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II A Jakarta. Lapas terbuka yang memiliki konsep dimana narapidana seperti dibaurkan dengan masyarakat sekitar yang tentunya berbeda dengan Lapas pada umumnya. Penelitian ini menjabarkan mengenai pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Terbuka tersebut. Dimana terdapat satu program kemandirian dimana narapidana bisa bekerja dengan masyarakat yang menjadi mitra kerja Lapas Terbuka. Tinjauan pustaka yang digunakan yaitu pembinaan kemandirian narapidana, kemandirian dan juga pemberdayaan. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif	Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian. Selain itu konsep pembinaan yang dilaksanakan juga berbeda karena penelitian sebelumnya meneliti mengenai Lapas Terbuka, sedangkan Lapas Klas 1 Malang yang akan menjadi lokasi penelitian bukan sebuah Lapas Terbuka. Serta, penelitian sebelumnya fokus pada pelaksanaan pembinaan kemandirian, sedangkan penelitian ini lebih meneliti tentang evaluasi dari pelaksanaan pembinaan kemandirian.
Skripsi Firanda Rahmadika, 2016, <i>Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana (Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru</i>	Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana menggunakan teori	Penelitian dilaksanakan pada lokasi yang sama yaitu Lapas Klas 1 Malang. Perbedaannya adalah pada pembahasan yaitu penelitian tersebut meneliti keseluruhan pembinaan yang

<p>Kota Malang)</p>	<p>implementasi kebijakan model Grindle dan konsep panopticon disiplin. Pembinaan dilaksanakan sesuai dengan keputusan menteri yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Namun pelaksanaan pembinaan agar narapidana menjadi lebih baik masih terhambat oleh beberapa hal seperti kurangnya petugas yang membina karena adanya <i>overcapacity</i> penghuni dan belum ada penanganan khusus terhadap narapidana residivis atau “Penjahat Kambuhan” yang perlu pembinaan tersendiri.</p>	<p>dilaksanakan di Lapas terhadap narapidana, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pembinaan kemandirian saja.</p>
<p>Jurnal Administrasi Publik Vol.3, No.1, Esti Hartiyanti Putri, Moch. Saleh Soeady, Ainul Hayat, <i>Evaluasi Kebijakan Peremajaan Angkutan Kota Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)</i></p>	<p>Evaluasi dilaksanakan pada pelaksanaan kebijakan peremajaan angkutan umum di Kota Malang dalam memperbaiki sarana publik dalam mengembangkan arus pembangunan. Tinjauan pustaka dari penelitian tersebut menggunakan kriteria evaluasi yang ditentukan oleh Dunn untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasilnya kebijakan tersebut membawa dampak positif terhadap masyarakat tapi kesadaran dari pemilik angkutan umum masih kurang</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini tentunya adalah lokasi penelitian dan juga pokok bahasan atau objek yang akan diteliti. Penelitian ini menjadikan pelaksanaan pembinaan kemandirian sebagai objek yang akan dievaluasi. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang kebijakan peremajaan angkutan umum.</p>
<p>Skripsi Yossy Herma Panjaya, 2011,</p>	<p>Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi</p>

<p><i>Evaluasi Program Raskin di Kota Semarang (Studi Kasus : Di Kelurahan Pedurungan Kidul)</i></p>	<p>pelaksanaan program RASKIN sebagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Kelurahan Pedurungan Kidul. Tinjauan pustaka yang digunakan adalah konsep mengenai kemiskinan dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas, ketepatan sasaran program, seberapa besar kontribusi program dalam mengentaskan kemiskinan serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program berlangsung</p>	<p>penelitian serta objek yang akan diteliti. Penelitian tersebut meneliti tentang pelaksanaan program RASKIN sebagai program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kemandirian terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.</p>
<p>Skripsi Ernawati, 2016, <i>Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza BandarJaya, Lampung Tengah</i></p>	<p>Penelitian tersebut mengambil fokus permasalahan terhadap tata kelola pasar yang belum ditetapkan peraturan tentang tata kelola pasar yang secara khusus. Tinjauan pustaka yang digunakan adalah kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik dan tata kelola pasar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pengelolaan belum terlaksana dengan baik, belum efisien dalam hal SDM, dari segi kecukupan belum tercukupi namun dari sisi masyarakat kebutuhan telah tercukupi dengan tata kelola yang</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian, juga fokus penelitian. Objek yang akan dievaluasi dalam penelitian sebelumnya adalah kebijakan mengenai tata kelola pasar sedangkan penelitian ini lebih fokus pada evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.</p>

	telah ada, respon dari masyarakat cukup baik atas tata kelola yang dilaksanakan	
--	---	--

Sumber: Hasil Olahan Penulis 2018

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Evaluasi

Dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah disebutkan dalam sub-bab rumusan masalah, penulis menggunakan teori evaluasi yang digunakan dalam memberikan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang dijabarkan pada sub-bab ini.

2.2.1.1 Pengertian Evaluasi

Secara umum evaluasi merupakan sebuah tindakan yang menilai, seperti yang tertera pada KBBI bahwa definisi kata evaluasi adalah penilaian.⁸Evaluasi merupakan suatu proses akhir dalam sebuah kebijakan yang sifatnya menilai bagaimana kebijakan tersebut setelah diimplementasikan. Walaupun merupakan proses terakhir, bukan berarti setelah dievaluasi sebuah kebijakan akan berhenti prosesnya. Karena dengan adanya evaluasi kebijakan akan diketahui apa saja yang perlu ditambah atau dibuang demi kebaikan pelaksanaan kebijakan agar kebijakan lebih sesuai dengan keadaan yang ada.

Banyak pendapat mengenai evaluasi baik itu pengertian, definisi, dan juga tujuan adanya evaluasi. Wirawan, mengatakan bahwa kegiatan evaluasi bermaksud untuk mengetahui keberhasilan suatu objek dan pencapaian harapan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/evaluasi>, Diakses pada 1 April 2018, pukul 20.50

dari objek tersebut. Wirawan juga mengatakan bahwa, evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, serta membandingkan dengan kriteria, standar dan indikator.⁹ Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Jabar yang mengartikan evaluasi sebagai proses menentukan hasil yang dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.¹⁰

Dari kedua pendapat tersebut, evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian dari suatu objek yang dievaluasi untuk disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria dalam evaluasi. Setelah diketahui pencapaian dari suatu objek tersebut, maka akan ditentukan hal apa yang akan dicapai selanjutnya untuk mencapai tujuan baik itu dengan menutup kekurangan yang ada maupun dengan menambahkan hal baru yang akan mendukung tercapainya tujuan.

Selanjutnya adalah evaluasi dalam proses kebijakan, seperti yang telah disebutkan bahwa evaluasi merupakan proses terakhir dalam kebijakan. Dalam bukunya, Abidin menjabarkan arti evaluasi kebijakan secara lengkap dalam 3 pengertian.

1. Evaluasi awal, yaitu dari perumusan kebijakan saat sebelum diimplementasikan (*ex-ante evaluation*)
2. Evaluasi dalam proses implementasi atau *monitoring*

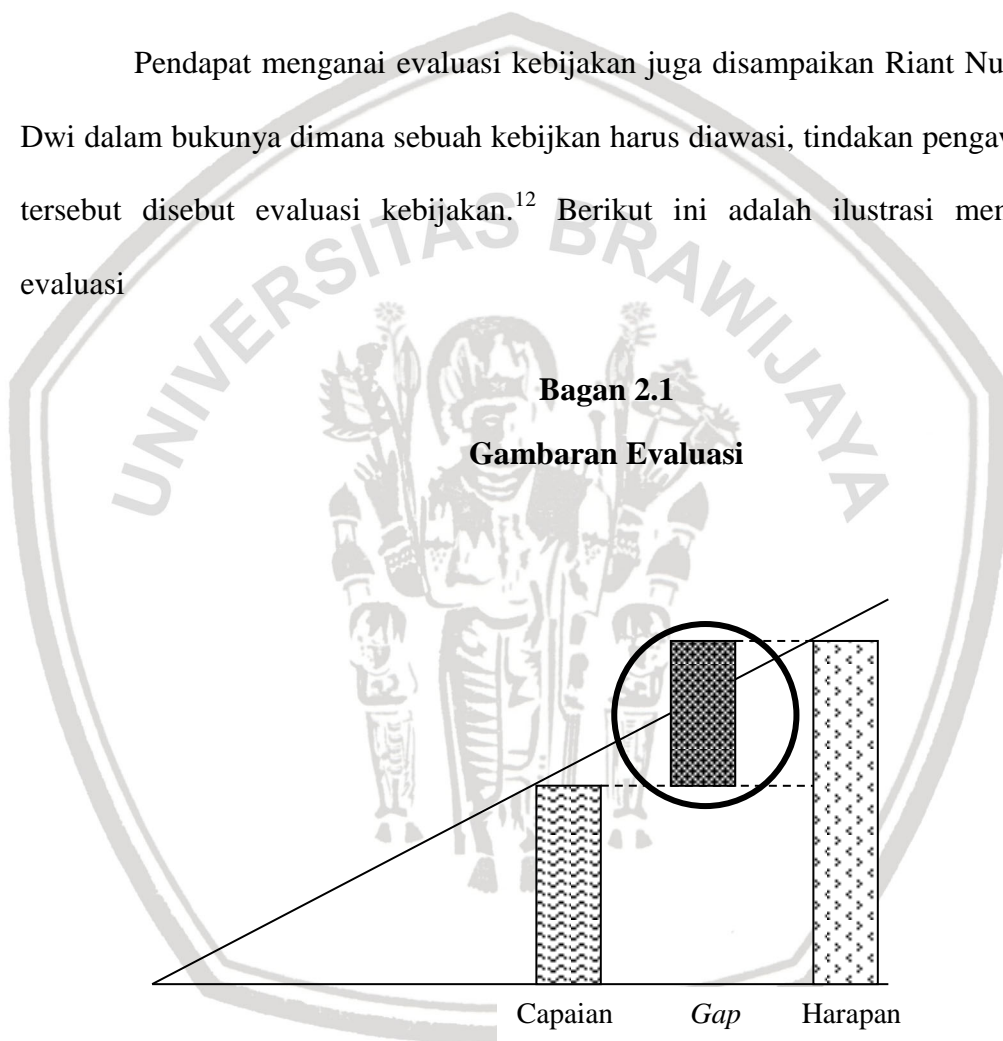
⁹ Wirawan, 2009, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, hlm 4

¹⁰ Suharsimi Arikunto dan C. Jabar, 2010, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 1

3. Evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan (*ex-post evaluation*)¹¹

Kegiatan *monitoring* atau evaluasi pada saat kebijakan diimplementasikan, dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi yang ada agar hal-hal yang menjadi target kebijakan tersebut berhasil dicapai.

Pendapat mengenai evaluasi kebijakan juga disampaikan Riant Nugroho Dwi dalam bukunya dimana sebuah kebijakan harus diawasi, tindakan pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan.¹² Berikut ini adalah ilustrasi mengenai evaluasi



Sumber: Riant Nugroho Dwi, 2003

¹¹ Said Zainal Abidin, 2012, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika, hlm 165

¹² Riant Nugroho Dwi, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm 183

Seperti yang terlihat pada gambar, tujuan dari evaluasi adalah untuk melihat *gap* atau kesenjangan antara harapan dan apa yang selama ini telah dicapai, bukan untuk menyalahkan suatu pelaksanaan kebijakan. Dengan diketahui kesenjangan tersebut maka akan membantu aktor pelaksana untuk mengetahui apa yang akan dilakukan kedepannya untuk menutup kekurangan yang ada.

2.2.1.2 Model Evaluasi CIPP

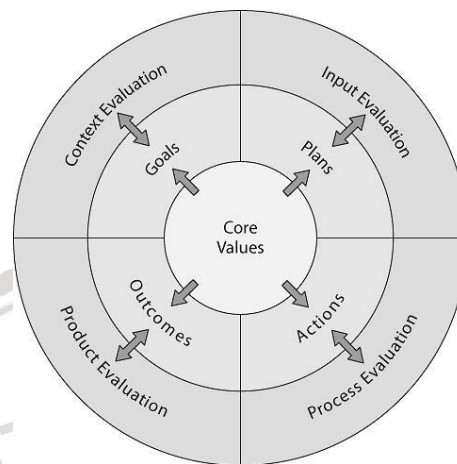
Model evaluasi CIPP merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam.

Model evaluasi ini dikembangkan pada sekitar tahun 1960 dan digunakan untuk menunjang perbaikan dan mencapai akuntabilitas yang pada saat itu adalah untuk sebuah proyek sekolah umum di Amerika yang dibiayai pemerintah. Model evaluasi CIPP kemudian diadaptasi dan diaplikasikan di Amerika dan negara-negara lain, juga diterapkan diberbagai disiplin ilmu.¹³

CIPP sendiri merupakan singkatan dari *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*. Sesuai dengan namanya, model evaluasi ini akan menilai konteks, input, proses dan juga produk dari objek yang menjadi target evaluasi. Keempat hal tersebut merupakan komponen dari evaluasi CIPP, yang mana komponen-komponen tersebut dapat saling berkaitan untuk menghasilkan sebuah penilaian yang tepat.

¹³ Daniel L. Stufflebeam dan Chris L. S. Coryn, 2014, *Evaluation Theory, Models and Applications*, 2nd edition, San Fransisco: Jossey Bass, hlm 309

Bagan 2.2
Komponen Evaluasi CIPP



Sumber : Daniel L. Stufflebeam dan Chris L. S. Coryn, 2014

Pada bagan di atas, digambarkan terdapat tiga lingkaran yang dibagi menjadi empat bagian. Lingkaran terdalam diibaratkan sebagai *core value* yaitu hal yang akan dinilai dalam evaluasi. Selanjutnya lingkaran kedua terbagi menjadi empat bagian dan terdapat anak panah dari *core value* mengarah pada masing-masing bagian di lingkaran kedua. Anak panah tersebut menunjukkan bahwa keempat bagian yaitu sasaran, rencana, tindakan dan hasil pelaksanaan, tersebut merupakan bagian dari *core value*. Kemudian di lingkaran terluar juga terbagi menjadi empat bagian dengan anak panah yang terhubung dari lingkaran kedua. Lingkaran terluar menunjukkan komponen dari model evaluasi CIPP yaitu evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses dan evaluasi produk. Anak panah yang menghubungkan lingkaran tengah dan lingkaran terluar menunjukkan hubungan timbal balik antara bagian dari *core value* dengan komponen model evaluasi CIPP.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai keempat komponen yang terdapat dalam model evaluasi CIPP:

a. *Context Evaluation*, atau evaluasi konteks dalam CIPP ini memiliki tujuan untuk menilai keadaan yang ada seperti kebutuhan, permasalahan yang mendasari sebuah program atau kebijakan. Tujuan dari evaluasi konteks adalah mengidentifikasi sasaran, kebutuhan, masalah yang mendasari kebutuhan.¹⁴ Pada intinya, evaluasi konteks adalah menilai kondisi yang sesungguhnya dan apa yang dibutuhkan yang mendasari munculnya sebuah program atau kebijakan. Sehingga nantinya hal yang dibutuhkan tersebut akan menjadi target sasarannya.

b. *Input evaluation*, atau diartikan sebagai evaluasi terhadap masukan yang mendukung pencapaian target sasaran. Masukan yang dimaksud adalah berupa rencana yang akan dilakukan untuk mencapai target.

Input atau masukan yang dinilai pada dasarnya adalah strategi, rencana kerja, sumber daya, intervensi dari pihak lain dalam mencapai target. Tujuan evaluasi masukan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menilai kemampuan dari strategi, rencana, sumber daya, dan keterlibatan pihak lain.¹⁵

Pada evaluasi masukan objek evaluasi yang telah diidentifikasi akan di nilai pula kemampuannya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

c. *Process evaluation*, sesuai dengan namanya, evaluasi ini dilakukan dalam proses pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi proses ini memantau dan membuktikan kesesuaian pelaksanaan dan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Juga memberikan informasi apabila

¹⁴ *Ibid*, hlm 319

¹⁵ *Ibid*

terjadi sebuah hambatan dalam rencana maupun menegaskan apabila rencana berjalan dengan baik setelah diimplementasikan.¹⁶

- d. *Product evaluation*, merupakan evaluasi penilaian setelah rencana dalam mencapai target dilaksanakan.

Tujuan dari evaluasi produk ini adalah untuk mengidentifikasi hasil yang telah didapatkan baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, kemudian dikaitkan dengan tujuan dan kebutuhan yang dinilai secara konteks, masukkan, serta proses, dan juga menilai faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kualitas, nilai, kejujuran, keadilan biaya, keamanan, dan signifikansi.¹⁷

2.2.2 Pemasyarakatan

2.2.2.1 Pengertian Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan.¹⁸ Pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan sendiri dilaksanakan pada dua institusi yaitu Lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Lapas merupakan institusi untuk membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan atau warga binaan dibawah umur. Sedangkan Bapas membina klien pemasyarakatan atau warga binaan yang sedang menjalani CB, CMB, PB (cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat).

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Op.Cit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 1*

Dari kedua institusi pemasyarakatan tersebut, Lapas memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks daripada Bapas meskipun keduanya juga memiliki tanggung jawab yang sama besarnya. Lapas bertanggung jawab atas pembinaan dan juga keamanan dari institusi dan juga warga binaan penghuni. Lapas bertugas untuk membina para pelaku kriminal untuk dipersiapkan menjadi warga negara yang baik. Lapas juga bertanggung jawab atas keamanannya karena penghuni Lapas sendiri merupakan orang yang sebelumnya melakukan kriminalitas yang akan dan sedang dibina. Berbeda dengan Bapas yang melaksanakan tanggung jawab untuk mengawasi klien pemasyarakatan yang telah dibina oleh Lapas yang sedang berada di masyarakat untuk bersosialisasi.

Dalam pemasyarakatan terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan.

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satudengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.

- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.¹⁹

2.2.2.2 Pembinaan Kemandirian Narapidana

Pembinaan dalam pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan. Dalam arti narapidana atau warga binaan adalah seseorang yang tengah mengalami krisis, tengah berada di persimpangan jalan, tengah mengalami dissosialisasi dengan masyarakat, tengah merencanakan kehidupan baru setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.²⁰ Pembinaan narapidana telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Salah satu pola pembinaan terhadap narapidana adalah pola pembinaan kemandirian. Dimana narapidana lebih diarahkan untuk mengembangkan dirinya untuk mempersiapkan diri ketika ia sudah bebas kelak yang mana hal tersebut akan bisa dijadikan lapangan pekerjaan sendiri baginya. Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program²¹ :

- a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni,

¹⁹ Harsono C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hlm 5

²⁰ *Ibid*, hlm 53

²¹ *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.*

maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengem-bangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

- d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Selain dijelaskan mengenai ruang lingkup Pembinaan Kemandirian, pada Keputusan Menteri tersebut juga dijelaskan hal lain yang berkaitan dengan Pembinaan Kemandirian yaitu tujuan.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya;

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.²²

Metode yang digunakan dalam melaksanakan Pembinaan Kemandirian juga dijelaskan pada Keputusan Menteri Kehakiman M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tersebut. Metode-metode yang dijelaskan dalam melaksanakan Pembinaan Kemandirian yaitu,

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyara-katan).
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.²³

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

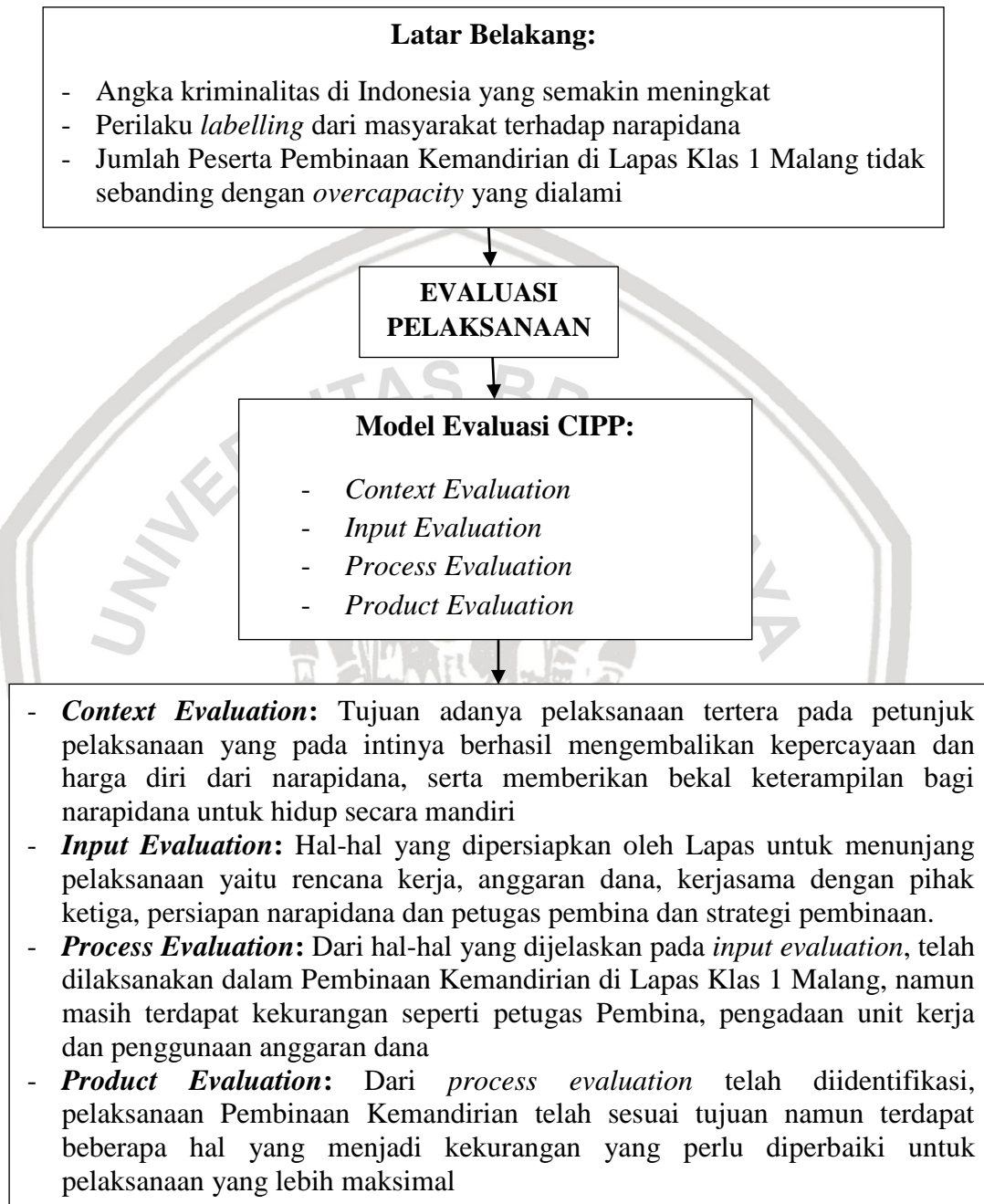
2.3 Alur Pikir Penelitian

Berikut ini adalah alur pikir penelitian yang ditentukan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian, latar belakang dan juga teori yang digunakan dalam penelitian



Bagan 2.3

Alur Pikir Penelitian



Sumber: Hasil Olahan Penulis 2018



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini. Penjelasan pada Bab ini diantaranya adalah mengenai jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan fokus penelitian, jenis data yang diambil dari penelitian ini beserta teknik pengumpulannya, juga teknik untuk melakukan analisa terhadap data yang telah diperoleh.

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yang dimaksud penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang ada.¹ Data-data tersebut merupakan data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang bukan menunjukkan angka. Objek dalam penelitian ini adalah aktor-aktor pelaksana yang terkait dalam pembinaan di Lapas khususnya pembinaan kemandirian seperti petugas di setiap unit kerja dan juga para narapidana selaku WBP yang dibina di dalam Lapas. Dimana para objek penelitian akan dimintai pendapatnya mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang.

3.2 Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dimana penelitian dilaksanakan oleh penulis. Lokasi penelitian ini yaitu di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2012, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Bumi Aksara, hlm 44

1 Malang sebagai unit pelaksana kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Untuk mendapatkan data pendukung, penulis juga akan mengumpulkan data-data terkait di masyarakat yaitu tentang mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Fokus yang diambil untuk penelitian ini adalah mengenai evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang, serta pendukung dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian tersebut. Maksud dari fokus penelitian di atas yaitu penulis meneliti bagaimana evaluasi dari pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu pembinaan kemandirian terhadap narapidana berdasarkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

3.3 Jenis Data

Data yang diperoleh dari pengumpulan data, merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian. Data tersebut diolah lebih lanjut untuk dianalisis hingga digunakan untuk menarik kesimpulan. Jenis data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Sumarsono dalam bukunya mengatakan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek riset oleh pengumpul data.² Data primer yang dimaksud adalah informasi yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan melalui wawancara oleh peneliti.

² HM. Sonny Sumarsono, 2004, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta:Graha Ilmu, hlm 81

3.3.2 Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah diambil dari peneliti lain atau data-data yang telah diolah sebelumnya. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.³ Misalnya data laporan dari instansi berkaitan atau data yang diperoleh langsung oleh peneliti lain. Pada skripsi ini data sekunder diperoleh dengan metode dokumentasi. Terdapat kategori yang menunjukkan bahwa sebuah data merupakan data sekunder, yaitu:

- a. Data bentuk teks : dokumen, pengumuman, surat-surat, dan sependuk
- b. Data bentuk gambar : foto, animasi dan *billboard*
- c. Data bentuk suara : hasil rekaman kaset
- d. Kombinasi teks, gambar, dan suara : film, video, iklan di televisi⁴

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, terdapat metode-metode yang penulis gunakan dalam memperoleh data-data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan juga studi dokumentasi.

3.4.1 Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu dimana peneliti yang secara langsung dan bertatap muka melakukan tanya-jawab dengan narasumber untuk menggali informasi yang menjadi data dalam sebuah penelitian. Wawancara merupakan suatu bagian penting dalam memperoleh data. Tanpa wawancara

³ *Ibid*

⁴ Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta:Graha Ilmu, hlm 11.

penelitian akan kehilangan informasi yang hanya didapat dengan bertanya langsung kepada responden.⁵

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik wawancara dengan beberapa narasumber atau informan yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk menunjang perolehan data yang diperlukan. Untuk wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tertutup dan terstruktur dimana peneliti melakukan wawancara dengan satu-persatu informan dengan menggunakan panduan wawancara yang berupa daftar pertanyaan terkait dengan pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁶ Dalam menentukan informan atau narasumber dalam penelitian ini akan digunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menentukan informan kunci yang memiliki informasi terkait dengan penelitian ini yaitu tentang pembinaan kemandirian sebelum pelaksanaan wawancara. Berikut ini daftar narasumber sebagai sumber informasi dalam mendukung penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 3.1

Daftar Informan atau Narasumber

NARASUMBER	ALASAN
Effendy Yulianto, Kepala Bidang Kegiatan Kerja)	Mengetahui segala sesuatu mengenai kegiatan kerja narapidana dari sarana kerja, kegiatan bimbingan kerja, dan

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.Cit*, hlm 80

⁶ Lexy, J. Moleong, 2014, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 82

	pengelolaan hasil kerja
Gatot S. Pratomo, Kepala Seksi Bimbingan Kerja)	Mengetahui seluruh pelaksanaan kegiatan bimbingan kerja narapidana
Ahmad Efendi, Petugas unit kerja <i>handycraft</i>	Selaku petugas yang mengelola dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di unit kerja
Nawawi, Petugas unit kerja budidaya jamur dan perikanan	Selaku petugas yang mengelola dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di unit kerja
Kusdaryanto, Petugas unit kerja pembuatan tempe dan Kepala seksi sarana kerja	Selaku petugas yang mengelola dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di unit kerja
Daryono, Petugas unit kerja pembuatan keset dan jahitan	Selaku petugas yang mengelola dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di unit kerja
Bagus, Narapidana yang mengikuti bimbingan kerja <i>handycraft</i>	Orang yang secara langsung menerima binaan di kegiatan kerja narapidana
Rudi, Narapidana yang mengikuti bimbingan kerja <i>handycraft</i>	Orang yang secara langsung menerima binaan di kegiatan kerja narapidana
Pranoto, Narapidana yang mengikuti bimbingan kerja budidaya jamur dan perikanan	Orang yang secara langsung menerima binaan di kegiatan kerja narapidana
Misnadi, Narapidana yang mengikuti bimbingan kerja pembuatan tempe	Orang yang secara langsung menerima binaan di kegiatan kerja narapidana
Sugianto, Narapidana yang mengikuti bimbingan kerja pembuatan keset	Orang yang secara langsung menerima binaan di kegiatan kerja narapidana
Ismail, Narapidana yang mengikuti bimbingan kerja pembuatan keset (narapidana baru)	Orang yang secara langsung menerima binaan di kegiatan kerja narapidana
Herdy Pramono, Staff Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur	Selaku informan ahli yang mengetahui bagaimana seharusnya pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan dilaksanakan

Sumber : Hasil Olahan Penulis 2018

3.4.2 Dokumentasi

Dalam memperoleh data pendukung, pada penelitian ini penulis juga melakukan dokumentasi untuk membantu perolehan data. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tertulis yang didokumentasikan penulis

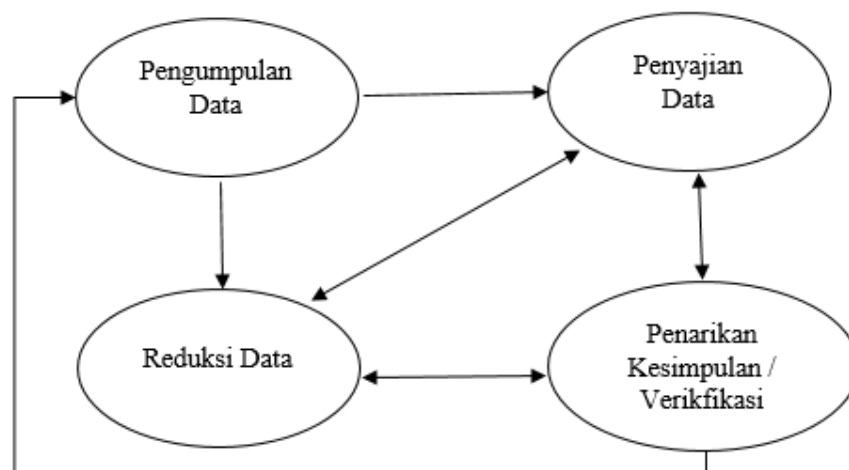
yaitu seperti buku-buku, jurnal dan skripsi yang terkait dengan penelitian ini, produk hukum seperti undang-undang terkait dengan pelaksanaan Pembinaan Kemandirian, dan juga berita-berita dari media terkait Pembinaan kemandirian.

3.5 Teknik Analisis Data

Selanjutnya adalah teknik analisis data setelah data-data diperoleh dan dikumpulkan. Dalam analisis data, data yang telah didapatkan dipilah agar mudah dipahami. Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, serta mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus penelitian.⁷ Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu model analisis interaktif.

Bagan 3.1

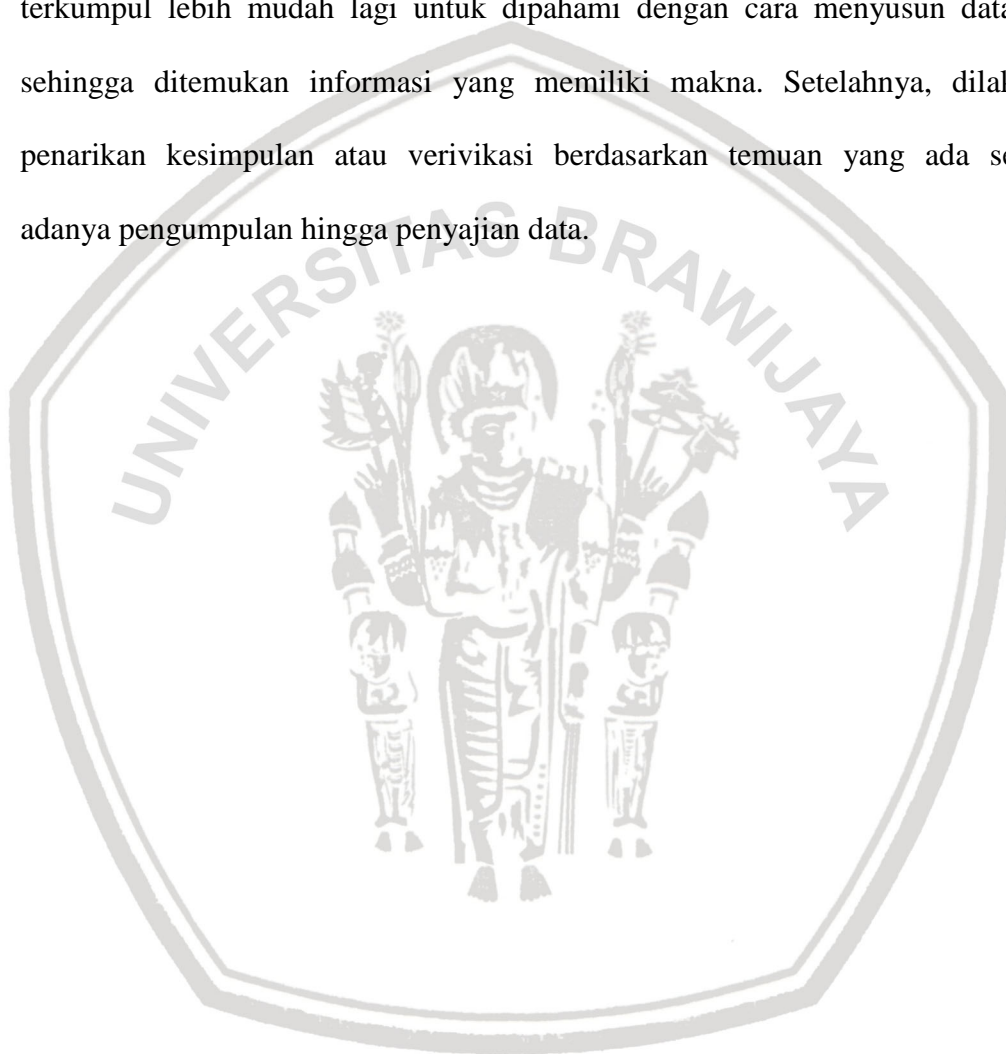
Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



Sumber : Buku Djam'an Satori dan Aan Komarian, 2017

⁷Bogdan & Taylor Dalam Imam Gunawan, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Hlm. 209

Penerapan model analisis ini dilakukan dengan pengumpulan data selama penelitian, kemudian reduksi data yang dapat berupa ringkasan data, catatan-catatan, maupun *coding* dari data yang telah didapatkan. Setelah adanya pengumpulan data dan reduksi dilakukan penyajian data, dimana data yang telah terkumpul lebih mudah lagi untuk dipahami dengan cara menyusun data-data sehingga ditemukan informasi yang memiliki makna. Setelahnya, dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan temuan yang ada setelah adanya pengumpulan hingga penyajian data.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang berlokasi di Jalan Asahan Nomor 7 Malang, merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa Lapas adalah tempat bagi warga binaan pemasyarakatan menjalani masa pidananya untuk dibina menjadi warga negara yang baik. Kapasitas atau daya tampung dari Lapas Klas 1 Malang adalah sebanyak 1.282 penghuni.¹ Penghuni saat ini, berdasarkan data terakhir pada tanggal 24 Juli 2018 adalah sebanyak 2.780 orang yang termasuk narapidana dan tahanan.²

Bangunan Lapas Klas 1 Malang ini merupakan bangunan peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1918. Luas tanah Lapas Klas 1 Malang 50.110 m² dengan luas bangunan 14.679 m².³ Luas bangunan Lapas Klas 1 Malang, terdiri dari : gedung perkantoran; blok kamar hunian yaitu sebanyak 22 Blok dan 211 kamar; bengkel kerja bagi WBP untuk melakukan kegiatan kerja; rumah sakit Lapas; tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura; aula atau gedung serbaguna; sarana lapangan olahraga (voli, basket, tenis, bulutangkis); lahan taman dan pertanian.

¹ lapasmalang.com, <http://lapasmalang.com/index.php/profil/visi-misi>, diakses 2 Agustus 2018, pukul 17.00.

² Berdasarkan data Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang tanggal 24 Juli 2018

³ *Op.Cit*, lapasmalang.com

Tabel 4.1

Blok Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang

BLOK	KETERANGAN
Blok I	Blok tahanan
Blok II	Blok rumah sakit dan rehabilitasi Lapas
Blok III	Blok tahanan dan narapidana anak-anak
Blok IV, V, VI	Blok pelayan dapur, pramuka dan pertanian
Blok VII	Blok eksklusif
Blok VIII, IX, X, XI	Blok narapidana
Blok XII, XIII	Blok pengasingan bagi narapidana yang melakukan pelanggaran
Blok XIV	Blok kriminal umum
Blok XV	Blok kriminal umum (karantina bagi narapidana yang baru saja dilayar)
Blok XVI	Blok kriminal umum
Blok XVII	Blok kriminal umum lansia
Blok XVIII	Blok pelayan Admisi Orientasi
Blok XIX, XX, XXI, XXII	Blok pesantren

Sumber : Lapas Klas 1 Malang, 2018

Lapas Klas 1 Malang juga memiliki lahan yang letaknya berada di daerah Gunung Kawi Kabupaten Malang. Lahan tersebut diperuntukan bagi narapidana-narapidana terpilih yang sedang berada dalam tahap pembinaan asimilasi lahan tersebut disebut dengan pondok asimilasi. Lokasi pondok asimilasi tersebut tepatnya berada di Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seluas 20.460 m². Pada tanah tersebut terdapat bangunan seluas 147 m² yang dibangun pada tahun 2004.⁴ Sisa lahan digunakan untuk lahan pertanian dan peternakan yang juga dijadikan sebagai Kegiatan Kerja untuk para narapidana yang sedang berada di pondok asimilasi.

⁴ Op.Cit, Firanda Rahmadika

4.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

a. Visi

Visi dari sebuah instansi merupakan suatu tujuan utama yang akan dicapai sebuah instansi dalam melaksanakan tugasnya. Visi dari Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang yaitu *Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparandan Inovati)*⁵

b. Misi

Misi adalah tujuan yang akan dicapai dalam rangka mencapai tujuan utama atau visi. Berikut ini adalah Misi yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam mencapai visinya⁶ :

1. Melaksanakan Pengamanan dengan PASTI
2. Melaksanakan Pembinaan dengan PASTI
3. Melaksanakan Pelayanan dengan PASTI
4. Melaksanakan Managemen Rumah Tangga & Ketatausahaan dengan PASTI

c. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Tugas pokok dari Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri tersebut adalah melaksanakan pemasyarakatan

⁵ *Op.Cit*, lapasmalang.com

⁶ *Ibid*

narapidana/anak didik.⁷ Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan pun dijelaskan dalam Keputusan Menteri tersebut, yaitu⁸ :

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

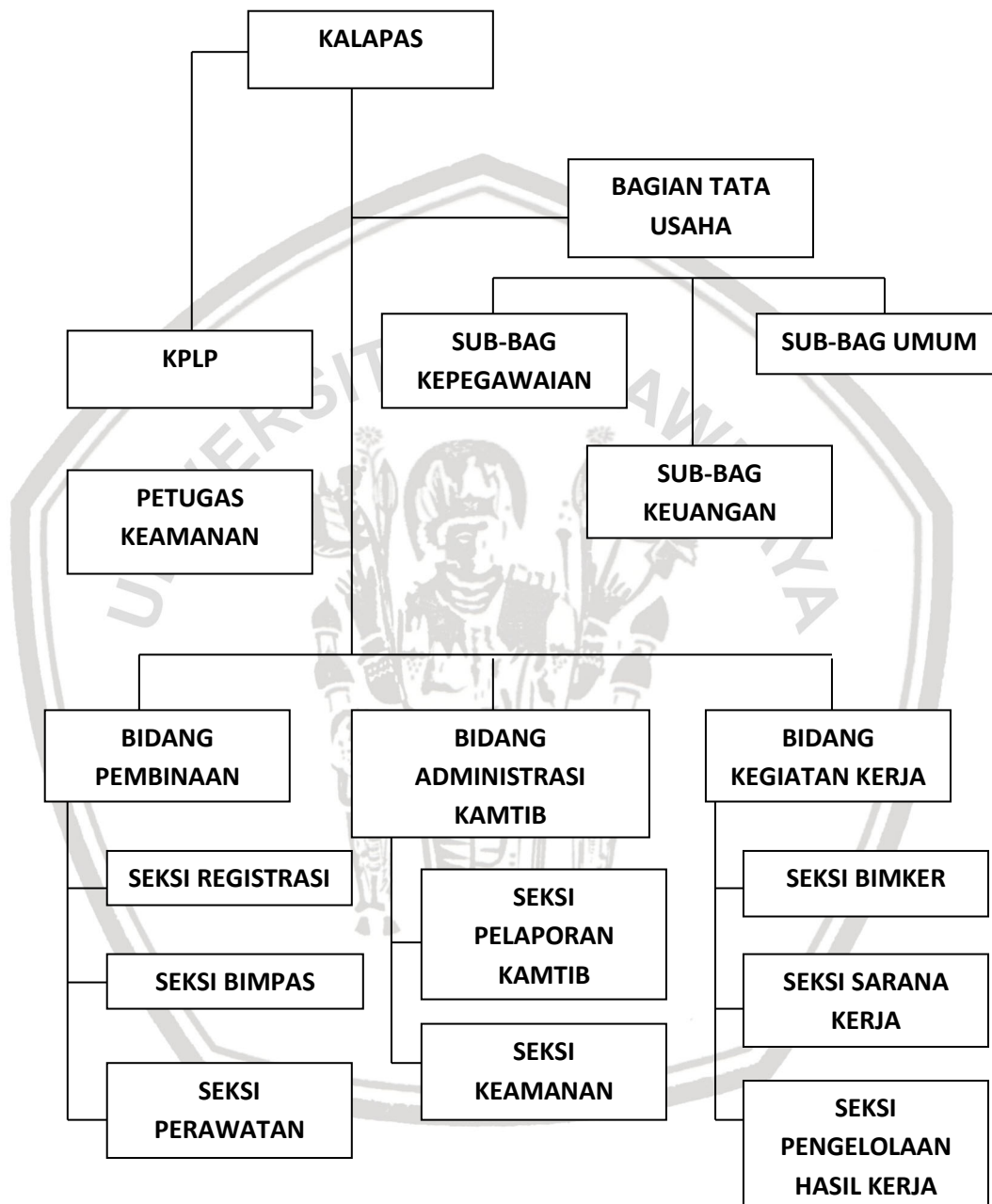
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang memiliki susunan struktur organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang terdiri dari sejumlah bidang dan bagian-bagiannya. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang yaitu sebagai berikut:

⁷ Op. Cit, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985*, Pasal 2

⁸ *Ibid*, Pasal 3

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang



Sumber : Data Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang, 2018

Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang terdiri dari beberapa bagian yang tentunya memiliki peranan masing-masing. Bagian-bagian tersebut sangat berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga pemasyarakatan Klas 1 Malang dan mencapai visi-misi dari Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Bagian-bagian tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam menjalankan peranannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha memiliki tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga dan fungsi sebagai berikut:

- Melakukan urusan keuangan yang ditugaskan kepada bagian Sub-Bag Keuangan
- Melakukan urusan kepegawaian yang ditugaskan kepada Bagian Sub-Bag Kepegawaian
- Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga yang ditugaskan kepada bagian Sub-Bag Umum⁹

2. Bidang Pembinaan

Bidang Pembinaan narapidana bertugas untuk melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana dan fungsi sebagai berikut :

- Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana yang ditugaskan pada Seksi Registrasi
- Memberikan bimbingan pemasyarakatan yang ditugaskan pada Seksi Bimbingan Pemasyarakatan (Bimpas)
- Mengurus kesehatan dan memberikan peraatan bagi narapidana yang ditugaskan pada Seksi Peraatan Narapidana¹⁰

⁹ *Ibid*, Pasal 6-9

¹⁰ *Ibid*, Pasal 10-13

3. Bidang Kegiatan Kerja

Bidang Kegiatan Kerja memiliki tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Bidang Kegiatan kerja juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana yang ditugaskan pada Seksi Bimbingan Kerja (Bimker)
- Mempersiapkan fasilitas sarana kerja yang ditugaskan pada Seksi Sarana Kerja
- Mengelola Hasil Kerja yang ditugaskan pada Seksi Pengelolaan Hasil Kerja¹¹

4. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bidang Administrasi Kamtib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang Administrasi Kamtib juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan yang ditugaskan kepada Seksi Keamanan
- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib yang ditugaskan kepada Seksi Pelaporan dan Tata Tertib¹²

5. Kesatuan Pengamanan LAPAS (KPLP)

Kesatuan Pengaman LAPAS atau lebih sering disebut dengan KPLP memiliki tugas utama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.

KPLP ini dipimpin oleh seorang kepala dan membawahkan petugas

¹¹ *Ibid*, pasal 15-17

¹² *Ibid*, pasal 21

Pengamanan. Kepala KPLP berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Lapas. KPLP juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatandan pengeluaran Narapidana
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.¹³

4.4 Gambaran Umum Pola Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

Pola Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang dilaksanakan dalam bentuk unit kerja, yang dikelola oleh Bidang Kegiatan Kerja yang terdiri terdiri dari Seksi Bimbingan Kerja, Seksi Sarana Kerja dan Seksi Pengelolaan Hasil Kerja. Bidang Kegiatan Kerja mencakup serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya sasaran pembinaan terhadap narapidana yaitu adanya integrasi dengan masyarakat.¹⁴ Seksi-seksi yang tergabung dalam Bidang Kegiatan Kerja ini mengelola hal-hal yang mendukung berjalannya kegiatan kerja sebagai bentuk pembinaan kemandirian di dalam Lapas Klas 1 Malang. Dukungan-dukkungan tersebut yaitu input kerja yang berupa sarana dan prasarana dikelola oleh Seksi Sarana Kerja, transformasi kerja berupa pelatihan kerja yang diberikan dikelola oleh Seksi Bimbingan Kerja, dan output berupa hasil kerja dari narapidana dikelola oleh Seksi Pengelolaan Hasil Kerja.

¹³ *Ibid*, pasal 23-24

¹⁴ *Op.Cit*, lapasmalang.com

a. Motto

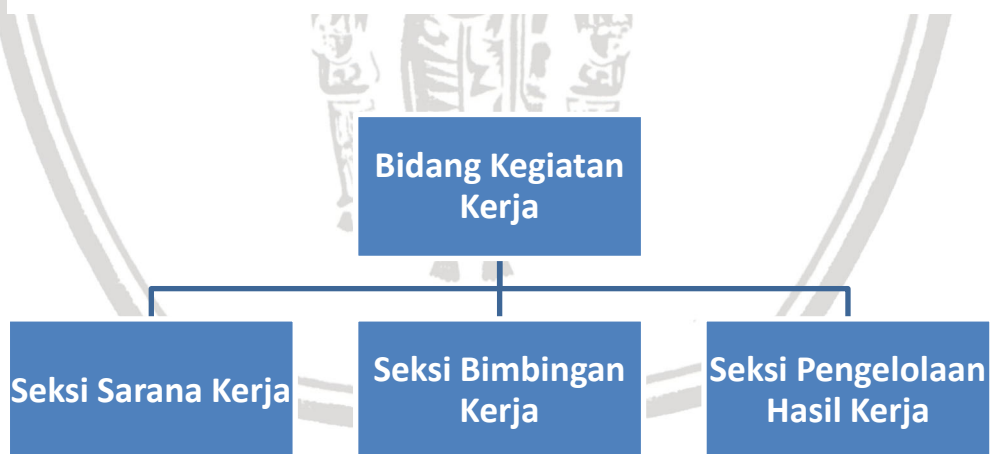
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu memberikan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan, Bidang Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang ini memiliki motto yaitu ***Membina, Mendidik, Memotivasi.***¹⁵

b. Struktur Organisasi Bidang Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

Bidang Kegiatan Kerja yang melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Klas 1 Malang, memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala bidang, kemudian kepala seksi dan juga petugas unit kerja.

Bagan 4.2

Struktur Organisasi Bidang Kegiatan Kerja LAPAS Klas 1 Malang



Sumber: Profil Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang, 2018

¹⁵ *Ibid.*

Secara struktural bagan diatas merupakan bagian-bagian dari Bidang Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang, dengan rincian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Kepala Bidang : memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Ketiga tugas tersebut didistribusikan pada 3 seksi kegiatan kerja
- Seksi Sarana Kerja : mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana kerja berupa peralatan dan perlengkapan
- Seksi Bimbingan Kerja : memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.
- Seksi Pengelolaan Hasil Kerja : mengelola hasil kerja berupa pemasaran hasil kerja dan pengelolaan pemasukan hasil penjualan hasil kerja¹⁶

Bidang kegiatan kerja juga terdiri dari petugas-petugas fungsional yang bertanggungjawab di masing-masing unit kerja yang dibawah oleh ketiga seksi di Bidang Kegiatan Kerja. Petugas-petugas di unit kerja juga memiliki tugas dan fungsi yaitu :

- Menerima WBP yang mengikuti kegiatan kerja
- Mengabsen WBP yang mengikuti kegiatan kerja
- Meneliti, memeriksa, menginventarisikan peralatan kerja
- Berperan sebagai pengawas dan instruktur bagi WBP di kegiatan kerja
- Berperan sebagai wali WBP di unit kerja tersebut
- Membuat laporan kegiatan¹⁷

d. Unit-unit Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

Lapas Klas 1 Malang merupakan salah satu Lapas besar di Indonesia yang telah memiliki banyak unit kerja yang sangat bervariasi, yang disediakan

¹⁶ Data Lapas Klas 1 Malang, 2018, *Profil Bidang Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang*.

¹⁷ Ibid

untuk narapidana. Unit kerja yang ada di Lapas Klas 1 Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Unit Kerja yang Dilaksanakan oleh Bidang Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang

No.	Jenis Bimbingan Kerja	Jenis Keterampilan
1.	Unit Keset	Pembuatan keset
2.	Unit Jamur dan Perikanan	Budidaya jamur dan budidaya ikan
3.	Unit Sablon	Sablon kaos
4.	Unit Bengkel	Perbengkelan dan las
5.	Unit Kerajinan Tangan	Pembuatan kerajinan dari kayu
6.	Unit Mebel	Pembuatan perabotan rumah tangga dari kayu
7.	Unit Ulat Hongkong	Budidaya ulat dan jangkrik
8.	Unit Pertanian	Pertanian sayuran
9.	Unit Hortikultura	Pertanian buah-buahan
10.	Unit Pertanian Terbuka Ngajum	Pertanian sayur bagi WBP yang sedang dalam tahap asimilasi
11.	Unit Menjahit	Menjahit pakaian, vermak
12.	Unit Tempe	Membuat Tempe

Sumber: Data Lapas Klas 1 Malang, 2018

BAB V

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MALANG

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut dengan Lapas melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam membina narapidana. Dalam membina narapidana, setiap Lapas melaksanakan Pembinaan Kemandirian terhadap narapidana. Pembinaan tersebut berupa kegiatan kerja yang dijadikan kegiatan sehari-hari bagi narapidana selama berada di Lapas yang membuat narapidana tetap produktif selama menjalani hukuman penjara. Seperti yang dilaksanakan di Lapas Klas 1 Malang, Pembinaan Kemandirian berupa kegiatan seperti membuat kerajinan ukir kayu, pertanian, hingga perbengkelan.

Sebuah pelaksanaan kebijakan memerlukan adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan beserta hal-hal yang perlu dioptimalkan agar kebijakan tersebut dapat berjalan lebih baik kedepannya. Pada Bab ini, dijelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan yaitu kebijakan mengenai Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang dengan menggunakan evaluasi CIPP (*context, input, process, product*) milik Daniel Stufflebeam. Dengan evaluasi CIPP, penulis mengevaluasi konteks dari pelaksanaan, masukan pelaksanaan, proses pelaksanaan dan produk pelaksanaan, yang terkait dengan pelaksanaan Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Klas 1 Malang dari sudut pandang aktor pelaksana dan juga narapidana selaku aktor yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan.

3.1 Context Evaluation

Context Evaluation atau evaluasi konteks merupakan evaluasi yang dilakukan pada konteks kebijakan. Konteks kebijakan ini berupa apa masalah yang mendasari pelaksanaan kebijakan. Sebuah kebijakan tentunya ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat agar kondisi menjadi lebih baik. Sama seperti kebijakan Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan di Lapas yang dilaksanakan untuk memberikan keterampilan kerja terhadap narapidana.

Pembinaan Kemandirian merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM yaitu kementerian yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia. Pelaksanaan pola pembinaan narapidana ini dapat berbeda sesuai kondisi Lapas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari kebijakan yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, pelaksanaan Pembinaan Kemandirian untuk narapidana di seluruh Lapas tentunya berlatar belakang pada masalah yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Herdy Pramono selaku *staff* Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk kegiatan keseharian narapidana di dalam Lapas.

“Pembinaan kemandirian itu diadakan di Lapas sama Rutan itu yang pertama memberikan kesibukan kepada narapidana di dalam, yang kedua supaya nantinya WBP itu setelah mempunyai keterampilan bisa digunakan

di luar untuk mungkin seperti bisa buka usaha sesuai keterampilan yang dimiliki tadi.”¹

Menurut Herdy, saat melalui proses hukumannya narapidana jelas akan merasa bosan atau jenuh karena secara terus menerus berada di dalam lingkungan Lapas. Dengan adanya kegiatan Pembinaan Kemandirian ini diharapkan dapat mengurangi kejenuhan yang dirasakan oleh para narapidana.

Pelaksanaan suatu kebijakan tentunya dilandasi dengan adanya dasar hukum berupa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya Pembinaan Kemandirian sebagai salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah memiliki dasar peraturan hukum yang mendukung. Berikut ini adalah beberapa dasar hukum yang menjadi latar belakang pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas.

Tabel 5.1

Peraturan Hukum Dasar Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian

Dasar Hukum Pelaksanaan	Keterangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Pemasyarakatan merupakan dasar adanya pembinaan terhadap narapidana. Dalam undang-undang tersebut terdapat hak dan kewajiban narapidana untuk ikut serta dalam kegiatan pembinaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan	Dasar hukum adanya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun	Dasar hukum mengenai keikutsertaan narapidana dalam kegiatan pembinaan

¹ Wawancara bersama Bapak Herdy Pramono, Staff Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM, 2 Juli 2018, pukul 09.29

1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	sebagai syarat pelaksanaan hak narapidana dalam hal masa tahanan (PB, CB, CMB, dan remisi)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.	
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan	Dasar hukum dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian terhadap narapidana

Sumber: Hasil olahan penulis, 2018

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan berisikan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lapas. Lapas Klas 1 Malang menjadikan produk hukum tersebut sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melaksanakan baik Pembinaan Kepribadian maupun Pembinaan Kemandirian. Tertera tujuan secara khusus dari pembinaan keseluruhan yang dilakukan. Tetapi secara khusus bagi Pembinaan Kemandirian, tujuannya menurut Keputusan Menteri Kehakiman tersebut yaitu

- Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.²

Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang sendiri dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada landasan hukum berupa undang-undang, dan juga peraturan-peraturan lainnya, yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada Lapas tersebut. Berdasarkan

² Op.Cit, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1990, hlm 5

pernyataan dari petugas Lapas yang secara langsung melaksanakan Pembinaan Kemandirian ini terhadap narapidana, latar belakang pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang utamanya adalah untuk memberikan bekal keterampilan pada narapidana. Selain itu seperti yang dikatakan oleh Effendy Yulianto, Kepala Bidang Kegiatan Kerja, yang mengelola Pembinaan Kemandirian, bahwa pelaksanaan Pembinaan Kemandirian bagi narapidana di Lapas Klas 1 Malang merupakan kewajiban bagi narapidana setelah ditetapkan oleh pengadilan.

“... jadi semua yang masuk ke LP ini setelah melalui proses registrasi masuk jadi warga binaan setelah putusan tetap itu mereka wajib untuk kerja disini. Wajib kerjanya ini wajib mengikuti kegiatan yang ada di Lapas *gitu* ya. Terus menuju ke Lapas Produksi dimana di dalam ini ada jenis-jenisnya seperti unit keset, handycraft, pertanian pertukangan.”³

Kewajiban narapidana untuk mengikuti kegiatan di dalam Lapas ini sesuai dengan aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hak dan kewajiban sebagai narapidana. Kewajiban yang disebutkan yaitu narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.⁴ Selain wajib mengikuti kegiatan disebutkan pula mengenai Lapas produksi dimana Lapas juga menghasilkan produk-produk karya narapidana yang mengikuti Pembinaan Kemandirian di unit-unit kegiatan kerja.

Selain kewajiban narapidana yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang, manfaat dari pembinaan terhadap narapidana juga menjadi latar belakang pelaksanaan.

³ Wawancara bersama Bapak Effendy Yulianto, Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang, 2 Juli 2018

⁴ Op.Cit, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 15

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam pemasyarakatan terdapat bentuk pembinaan dan pembimbingan. Pembinaan dilakukan oleh Lapas sedangkan Pembimbingan dilakukan oleh Bapas.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁵

Manfaat Pembinaan Kemandirian yang melatar belakangi pelaksanaannya di Lapas Klas 1 Malang yaitu kegiatan tersebut bisa meningkatkan kualitas narapidana dalam hal keterampilan dan pengalaman kerja yang di dapat dengan mengikuti kegiatan Pembinaan Kemandirian.

Mengenai dasar pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang, sesuai dengan yang dikatakan oleh Gatot S. Pratomo, Kepala Seksi Bimbingan Kerja,

“Tusi (Tugas dan Fungsi) dari kita atau visi misi dari Lapas itu kan kita memeberikan bekal keterampilan bagi narapidana. Jadi intinya itu *sih*, diharapkan setelah terjun ke masyarakat mereka bisa punya keterampilan khususnya ditujukan untuk bisa membuka usaha sendiri”⁶

Dari pernyataan Kepala Seksi Bimbingan Kerja, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang didasarkan pada fungsi Lapas yaitu melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kualitas diri narapidana. Dari fungsi lapas tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi tersebut dijadikan dasar kebutuhan Lapas Klas 1 Malang dalam memenuhi tugasnya dalam memberikan keterampilan bagi narapidana. Dari fungsi tersebut pun dikatakan

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1

⁶ Wawancara bersama Bapak Gatot S Pratomo, Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lapas Klas 1 Malang, 20 Juli 2018

bahwa sasaran dari pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas adalah narapidana. Hal tersebut karena fungsi Lapas dalam melaksanakan pembinaan tersebut adalah memberikan keterampilan bagi narapidana agar dapat membuka usahanya sendiri.

Dari sudut pandang narapidana, sebagai sasaran pelaksanaan Pembinaan Kemandirian, beberapa hal yang mendasari mereka memilih untuk mengikuti kegiatan Pembinaan Kemandirian adalah ingin mempelajari keterampilan yang disediakan oleh Lapas Klas 1 Malang, membutuhkan pengalaman yang nantinya dapat diterapkan setelah selesai menjalani hukuman, mencari kegiatan untuk mengurangi rasa jenuh, juga melanjutkan pekerjaannya saat masih berada di dalam lingkungan masyarakat. Seperti Bagus narapidana yang bekerja di unit kerja *handicraft* dan Ismail narapidana yang baru mengikuti unit kerja pembuatan keset, yang memiliki harapan agar mendapatkan pengalaman dan ilmu dengan mengikuti kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang.

Hal tersebut seperti yang diterangkan oleh Bagus, "... ya saya menyadari saya disini adalah warga binaan saya dapat ilmunya saja ya sudah untung buat saya. Jadi disini kita bekerja iya, belajar juga iya..."⁷ Sebelumnya, Bagus yang mengikuti unit kerja *handycraft* ukir kayu ini bekerja di sebuah usaha mebel. Bagus mengaku bahwa sebelumnya ia juga ingin belajar ukiran kayu kemudian ia tertarik untuk mengikuti kegiatan kerja unit *handycraft* di Lapas Klas 1 Malang. Berbeda dengan Bagus yang pekerjaan sebelumnya memiliki sedikit kemiripan dengan kegiatannya saat ini, Ismail yang merupakan narapidana baru di Lapas

⁷ Wawancara bersama Bagus, Narapidana, 31 Juli 2018

Klas 1 Malang ingin sekali mengikuti kegiatan unit kerja *handycraft* namun belum memiliki pengalaman dalam hal tersebut.

“Pingin cari pengalaman gitu lah. Kalau saya liat orang-orang bikin naga, bikin burung merak di *handycraft* itu saya perhatiin mbak. Saya tanya-tanya gimana biar bisa ikut bimker. Kan kalau gitu kan harus belajar dulu dari nol dulu ya saya liat, saya main ke tempatnya.”⁸

Latar belakang narapidana dalam mengikuti Pembinaan Kemandirian ini juga disampaikan oleh Rudi, “Dulu waktu di luar kan saya juga buat-buat *souvenir* gitu a, Mbak. Jadi melanjutkan *aja* biar gak kerasa (sedang) disini (di Lapas).”⁹ Rudi menjadikan Pembinaan Kemandirian sebagai kegiatan untuk membuat seolah-olah ia bukan sedang menjalani hukuman, melainkan ia sedang bekerja seperti biasa. Hal tersebut karena sebelum ia terjerat kasus narkoba dan menjalani hukuman di Lapas, ia bekerja dalam bidang pembuatan *souvenir*. Saat berada di Lapas Rudi memilih untuk mengikuti unit kerja *handycraft* yang berfokus pada kerajinan ukiran kayu.

Berbeda dengan Pranoto, seorang narapidana yang merupakan pelayan di unit kerja budidaya jamur dan ikan. Sebelumnya, Pranoto bekerja sebagai teknisi listrik di sebuah pabrik. Ia memilih kegiatan budidaya jamur dan ikan sebagai kegiatan pembinaan yang ia jalani, karena berharap kegiatan tersebut akan berguna setelah ia kembali berada di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah usaha untuk perekonomiannya apabila belum juga memiliki pekerjaan.

⁸ Wawancara bersama Ismail, Narapidana, 23 Agustus 2018

⁹ Wawancara bersama Rudi, Narapidana, 31 Juli 2018

“Ya buat pengalaman saya siapa tau nanti di rumah bisa dilanjutkan untuk buka usaha sendiri. Misal nanti cari kerjaan gak dapat, sementara nunggu kerjaan kan bisa usaha ini.”¹⁰

Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi Lapas Klas 1 Malang sendiri namun tetap berdasarkan dasar hukum yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi dari Lapas sendiri yaitu membina Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi sosok warga negara yang lebih baik dalam berperilaku dan juga keterampilan. Selain itu kegiatan Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan juga disesuaikan dengan kondisi narapidana di kemudian hari dan juga kondisi masyarakat saat ini. “...*basic* yang kita ambil *kan* yang tidak begitu membutuhkan modal besar tapi bisa menghasilkan. Ya seperti unit keset itu *kan* tidak butuh modal besar.”¹¹ Hal tersebut ditujukan untuk mantan narapidana yang akan memulai kembali kehidupannya di masyarakat khususnya dalam hal perekonomian, yaitu mata pencaharian.

Kegiatan Pembinaan Kemandirian ini selain menjadi kegiatan untuk menghilangkan rasa bosan dan kejenuhan di dalam Lapas, kegiatan ini juga dapat memberikan manfaat bagi mereka bukan hanya dalam hal ilmu, pengalaman atau pengisi kekosongan. Kegiatan Pembinaan Kemandirian ini dapat menjadi nilai penunjang bagi narapidana, ketika ia mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan juga remisi atau pengurangan masa tahanan. Keaktifan narapidana dalam mengikuti kegiatan

¹⁰ Wawancara bersama Pranoto, Narapidana, 9 Agustus 2018

¹¹ *Op.Cit*, Bapak Gatot S Pratomo

pembinaan di Lapas menjadi nilai tambah tersendiri dalam pengurusan PB, CB, CMB maupun remisi.

Latar belakang yang mendasari pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang secara umum adalah fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang telah tercantum pada dasar hukum pelaksanaan. Fungsi dari Lapas tersebut mencakup dasar kebutuhan dan sasaran dari pelaksanaannya. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas terdapat dua jenis yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian itu sendiri. Latar belakang masalah lainnya yang mendukung adanya pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang ini adalah kebutuhan akan adanya keterampilan dan pengalaman kerja bagi narapidana dan juga sebagai kegiatan sehari-hari narapidana selama berada di dalam Lapas untuk mengurangi kejenuhan yang dikhawatirkan akan berpengaruh pada keamanan Lapas.

3.2 *Input Evaluation*

Pada *input evaluation* atau masukan akan dijelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan dipersiapkan. *Input* atau masukan ini bertujuan untuk identifikasi hal-hal yang dibutuhkan dan perencanaan agar sebuah kebijakan dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan akan memerlukan susunan pedoman kemana kebijakan ini akan diarahkan dan juga bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaannya. Hal tersebut membutuhkan rencana pelaksanaan, strategi pelaksanaan dan juga anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan suatu

kebijakan. Untuk mempermudah melihat masukan dalam pelaksanaan kebijakan Pembinaan Kemandirian ini, akan terdapat beberapa poin yaitu rencana dalam pelaksanaan, anggaran, intervensi pihak ketiga dan pelatihan, persiapan dalam pelaksanaan, strategi pelaksanaan.

Pertama, rencana yang dibuat dalam pelaksanaan. Pada pelaksanaan Pembinaan Kemandirian yang dilakukan oleh Lapas Klas 1 Malang, persiapan untuk pelaksanaan Pembinaan Kemandirian ini secara rutin dipersiapkan oleh Bidang Kegiatan Kerja. Dalam mempersiapkan pelaksanaan, Bidang Kegiatan Kerja merencanakan kegiatan setiap tahunnya dengan menyusun Rencana Kerja Tahunan. Rencana kerja tentunya menjadi hal tahun tersebut. Pada tahun 2017 dan 2018, Lapas Klas 1 Malang membuat rincian Rencana Kerja dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian dengan rencana terus mengembangkan unit-unit kerja serta adanya pelatihan-pelatihan terhadap narapidana, baik dari pihak ketiga maupun dari pihak Lapas sendiri.

Tabel 5.2

Tabel Rencana Kerja Kegiatan Bimbingan Kerja Lapas Klas 1 Malang

Rencana Kerja Tahun 2017	Rencana Kerja Tahun 2018
a. Membuat Laporan Bulanan	a. Membuat Laporan Bulanan
b. Mempekerjakan WBP yang produktif untuk mengerjakan berbagai macam jenis keterampilan	b. Mempekerjakan WBP yang produktif untuk mengerjakan berbagai macam jenis keterampilan
c. Mengelola dana DIPA yang dipergunakan untuk mengembangkan : i. Unit Bengkel Las dan Otomotif ii. Unit Mebel dan Pertukangan	c. Mengelola dana DIPA yang dipergunakan untuk mengembangkan : i. Unit Bengkel Las dan Otomotif ii. Unit Mebel dan Pertukangan Kayu

<p>Kayu</p> <p>iii. Unit Percetakan Sablon</p> <p>iv. Unit Kerajinan dan <i>Handycraft</i></p> <p>v. Unit Keterampilan Jahitan</p> <p>vi. Unit Jamur dan Perikanan, dan Pertanian</p> <p>vii. Unit Pertanian di Lapas Terbuka Ngajum</p>	<p>iii. Unit Percetakan Sablon</p> <p>iv. Unit Kerajinan dan <i>Handycraft</i></p> <p>v. Unit Keterampilan Jahitan</p> <p>vi. Unit Jamur dan Perikanan, dan Pertanian</p> <p>vii. Unit Pertanian di Lapas Terbuka Ngajum</p>
d. Memberi Upah/ Premi dari hasil kerja	d. Memberi Upah/ Premi dari hasil kerja
<p>e. Pelatihan pada tahun 2017 :</p> <p>i. Pelatihan Peternakan dari Pihak Ketiga (Universitas Brawijaya)</p> <p>ii. Pelatihan Hortikultura dari Pihak Ketiga (Universitas Brawijaya)</p> <p>iii. Pelatihan Teknologi Informasi dan Service Aplikasi Gadget</p> <p>iv. Pelatihan Perbengkelan dan Las</p> <p>v. Pelatihan dari Pihak Ketiga (BLKI Singosari)</p>	<p>e. Pelatihan pada tahun 2018</p> <p>i. Pelatihan membuatik bekerjasama dengan pihak ketiga (Batik Blimbing Malang)</p> <p>ii. Pelatihan membuat tempe</p> <p>iii. Pelatihan membuat sari apel dan krispi jamur bekerjasama dengan pihak ketiga (UPT Disperindag Kota Batu)</p>

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018

Dari Rencana Kerja Tahunan Lapas Klas 1 Malang Tahun 2017 dan Tahun 2018, kegiatan yang rutin direncanakan tentunya adalah pelaksanaan unit-unit kerja yang ada di Lapas. Perbedaan yang ada dari kedua tahun tersebut adalah adanya pelatihan-pelatihan yang bervariasi yang diadakan untuk narapidana. Dengan mengadakan pelatihan-pelatihan ini akan mendukung pembinaan di Lapas bagi narapidana yang menjadi latar belakang pelaksanaan Pembinaan Kemandirian yaitu memberikan bekal keterampilan bagi narapidana. Dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga yang lebih memahami di suatu bidang akan dapat memperkaya pengalaman narapidana yang mengikuti pelatihan tersebut dengan keterampilan yang benar dan sesuai.

Kedua, dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan. Dalam mempersiapkan pelaksanaan tentunya dibutuhkan dana agar pelaksanaan kebijakan berjalan. Sumber dana yang dianggarkan untuk Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang berasal dari APBN. “Ini dananya dari APBN, untuk tiap tahunnya bervariasi. Kalau untuk tahun ini kita dapat dana untuk pelatihan sekitar berapa itu kurang lebih 40 juta, ...”¹² Menurut pihak dari Lapas Klas 1 Malang, jumlah tersebut terbilang sedikit unit kerja yang dilaksanakan dalam Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang ini terdiri dari 12 jenis unit kerja dan juga digunakan untuk Unit Pertanian Terbuka di Pondok Asimilasi Ngajum yang juga merupakan bagian dari Lapas Klas 1 Malang yang masih dalam proses pengembangan. Dengan sedikitnya dana tersebut tentunya akan menghambat kegiatan kerja narapidana karena bahan-bahan tidak selalu tersedia.

Ketiga, intervensi atau bantuan dari pihak lain. Untuk mengatasi dana anggaran yang tidak banyak, Gatot juga mengatakan bahwa dengan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dapat mengatasi adanya permasalahan dana tersebut. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga oleh Lapas Klas 1 Malang sendiri yaitu dilakukan dengan lembaga-lembaga pelatihan seperti Badan Latihan Kerja Industri (BLKI) Singosari dan juga perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya yang lebih mengerti di suatu bidang, seperti yang pernah dilakukan. Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama dalam hal pemberian keterampilan. Dalam periode Juni 2017 hingga Juni 2018, lembaga-lembaga yang

¹² *Ibid.*

memberikan pelatihan untuk mendukung Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang yaitu BLKI Singosari yang memberikan pelatihan dalam 4 kejuruan yaitu kejuruan bengkel otomotif, listrik dinamo, listrik peralatan rumah tangga, dan menjahit, yang diadakan selama satu bulan pada Juli 2017. Pada tahun 2018 bulan Mei, pelatihan dengan pihak ketiga selanjutnya adalah pelatihan membuat bersama Batik Blimbing Malang.

Pihak dari Kementerian Hukum dan HAM, Herdy mengatakan,

“... pihak ketiga yang akan diajak bekerjasama ini dikembalikan lagi kepada Lapas karena Lapas sendiri yang mengerti apa saja kebutuhan-kebutuhan disana. Kebutuhannya apa kemudian MoU nya dengan siapa seperti itu.”¹³

MoU dalam kerjasama dengan pihak ketiga ini menjadi solusi untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masing-masing Lapas. Jadi tidak ada ketentuan tersendiri untuk pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan Lapas, karena disesuaikan dengan kebutuhan dari Lapas sendiri. Di Lapas Klas 1 Malang, pihak ketiga yang bekerjasama dalam menunjang pelaksanaan Pembinaan Kemandirian telah mendukung hal-hal yang dibutuhkan, seperti pemberian pelatihan yang mendukung kegiatan pembinaan bagi narapidana.

Keempat, adalah bagaimana dari Lapas Klas 1 Malang sendiri mempersiapkan dalam Pembinaan Kemandirian. Hal yang paling utama dalam Pembinaan Kemandirian ini adalah petugas dari Lapas dan juga narapidana. Petugas sebagai sumberdaya pelaksanaan, yang ditugaskan di unit kerja dalam Pembinaan Kemandirian ini memiliki tugas dan fungsi selain mengawasi dan bertanggung jawab atas unit kerja yang ia bawahi, petugas juga memiliki peran

¹³ *Op.Cit*, Bapak Herdy Pramono

untuk memberikan binaan sesuai dengan bidang masing-masing unit kerja. Namun, untuk petugas unit sendiri, Lapas Klas 1 Malang tidak mempersiapkan secara khusus untuk petugas unit, seperti adanya pelatihan khusus petugas yang ditugaskan unit kerja.

Narapidana juga merupakan salah satu tokoh utama dalam sebuah Pembinaan Kemandirian. Hal ini mengenai bagaimana Lapas Klas 1 Malang mempersiapkan narapidana sebelum mengikuti kegiatan pembinaan. Lapas Klas 1 Malang sebelum memberikan kegiatan kepada narapidana memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada narapidana waktu kegiatan Admisi Orientasi (AO) kegiatan pengenalan kehidupan Lapas untuk narapidana dan juga adanya pengarahan dari psikolog sesuai dengan kepribadian dan bakat narapidana saat sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang merupakan penentuan kelulusan AO bagi narapidana. “Jadi awal masuk sini jadi napi mereka itu diasesmen oleh psikolog. Nanti ada recordnya ada dari hasil asesmen itu mereka cocoknya apa.”¹⁴

Dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang, tidak ada kriteria narapidana yang mengikuti kegiatan kerja. Dari petugas mengatakan bahwa semua narapidana diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan kerja jika memang narapidana tersebut memang memiliki keinginan yang besar untuk belajar dan semangat untuk menjadi lebih baik.

¹⁴ *Op.Cit.* Bapak Gatot S Pratomo

“*Monggo* dari kasus apapun *pokoknya* punya kemauan untuk belajar silahkan ikut. Minimal punya kemauan itu sudah jadi modal *kok*, bukan untuk saya tapi untuk mereka sendiri kedepannya.”¹⁵

Kelima, strategi pelaksanaan yang digunakan oleh Lapas Klas 1 Malang dalam keberlangsungan kegiatan Pembinaan Kemandirian ini juga menjadi sebuah *input* dalam pelaksanaan kebijakan Pembinaan Kemandirian. Strategi untuk melaksanakannya yaitu dengan melakukan pendekatan kepada narapidana. Petugas Lapas Klas 1 Malang secara umum memberikan pendekatan secara persuasif terhadap narapidana dalam melakukan pembinaan. Hal tersebut agar narapidana dapat menerima pembinaan dengan sukarela tanpa ada beban. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang secara kekeluargaan kepada narapidana.

Dari komponen *input evaluation*, Lapas Klas 1 Malang telah memberikan perencanaan dan mempersiapkan hal-hal untuk pelaksanaan dengan baik seperti adanya rencana kerja, anggaran dana yang berasal dari negara, kerjasama dengan pihak ketiga dalam menunjang pelaksanaan Pembinaan Kemandirian, persiapan narapidana dan strategi pelaksanaan telah dipersiapkan dengan baik. Namun yang belum dipersiapkan dengan baik adalah petugas unit kerja yang seharusnya membina di setiap unit kerja, belum mendapatkan pelatihan secara khusus pembinaan unit kerja sesuai bidangnya.

¹⁵ Wawancara bersama Bapak Nawawi, Petugas Unit Kerja Budidaya Jamur dan Perikanan, 9 Agustus 2018

3.3 *Process Evaluation*

Process Evaluation memiliki kesinambungan dengan *input evaluation*. Dalam evaluasi proses, dapat diketahui bagaimana rencana yang telah dibuat tersebut dilaksanakan. Serta bagaimana hal-hal pendukung lain pada *input* dipergunakan. *Process evaluation* menunjukkan bagaimana pelaksanaannya secara langsung hal-hal yang telah dipersiapkan dengan baik diatas yang telah dijelaskan pada *input evaluation*.

Pertama, rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan untuk Pembinaan Kemandirian secara umum adalah mengembangkan unit-unit kerja dan juga mengadakan pelatihan-pelatihan bagi narapidana. Pada periode Juni 2017 hingga Juni 2018 kesinambungan unit kerja telah dilaksanakan dilihat dari laporan bulanan rutin pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang. Hanya terdapat unit kerja yang tidak ada keberlanjutannya, yaitu unit kerja pembuatan tusuk sate. Unit pembuatan tusuk sate tersebut tidak lagi dicantumkan pada laporan bulanan bulan Agustus 2017. Namun demikian, terdapat unit kerja yang baru yaitu unit kerja pembuatan tempe.

Gambar 5.1**Unit Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang (Unit Kerja Mebel dan Budidaya Jamur)**

Sumber: Hasil dokumentasi penulis, 2018

Selain pelaksanaan unit kerja, dalam rencana tahunan pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Lapas Klas 1 Malang baik pada tahun 2017 maupun 2018 terdapat rencana pelatihan. Pada periode Juni 2017 hingga Juni 2018 pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan adalah

- Pelatihan kejuruan oleh pihak ketiga yaitu BLKI Singosari dilaksanakan pada Juli 2017
- Pelatihan membuat tempe oleh Bapak KUSDARYANTO, Kepala Seksi Sarana Kerja Lapas Klas 1 Malang dilaksanakan pada Februari 2018
- Pelatihan membatik dan membuat *handycraft* batik oleh pihak ketiga dilaksanakan pada 26 Mei 2018

Dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian terdapat hambatan yang sering dialami pada pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas, disampaikan oleh Herdy,

“Sampai saat ini ya, itu terkait dengan bengkel kerja yang tidak ada keberlanjutannya atau kesinambungan. Seperti yang sudah saya sampaikan

tadi, waktu narapidananya keluar kegiatannya berhenti, yang sering terjadi seperti itu.”¹⁶

Herdy juga menyampaikan pelaksanaan Pembinaan Kemandirian yang baik,

“Kalau masalah sudah baik atau belum ya kembali lagi itu tergantung dari Lapas masing-masing, mungkin dari rencana kinerjanya seperti apa sudah terlaksana atau belum seperti itu.”¹⁷

Mengenai Pembinaan Kemandirian yang baik, tertera pada Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang dijadikan petunjuk pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas 1 Malang khususnya pada Pembinaan Kemandirian. Dalam melaksanakan Pembinaan kemandirian terdapat beberapa jenis keterampilan yang harus dilaksanakan yaitu keterampilan dalam usaha mandiri, usaha industri kecil, pengembangan bakat, dan usaha industri atau kegiatan pertanian, seperti yang telah dijelaskan pada Tinjauan Pustaka mengenai Pembinaan Kemandirian. Untuk melihat jenis-jenis keterampilan yang dilaksanakan, penulis mengklasifikasikan unit-unit kerja yang dilaksanakan di Lapas Klas 1 Malang pada jenis-jenis keterampilan yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kehakiman.

Tabel 5.3

**Jenis Keterampilan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 1990**

Jenis Keterampilan	Penjelasan	Unit Kerja Lapas Klas 1 Malang
Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri	Keterampilan dalam usaha yang mengandalkan keahlian atau kemampuan yang	Unit kerja menjahit, unit kerja mebel, unit kerja bengkel las, unit kerja <i>handycraft</i> , unit kerja

¹⁶*Op.cit*, Bapak Herdy Pramono

¹⁷ *Ibid*.

	telah dimiliki.	sablon. Terdapat pula servis elektronik yang dikerjakan oleh narapidana tetapi tidak dijadikan unit kerja
Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil	Keterampilan dalam pengolahan bahan alam atau mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi seperti pengolahan rotan, pembuatan makanan ringan, dan sebagainya.	Unit Kerja Pembuatan Kaset, Unit Kerja Pembuatan Tempe
Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing	Keterampilan yang menyalurkan bakat-bakat yang telah dimiliki.	Belum ada unit kerja. Terdapat lukisan-lukisan karya narapidana yang dipajang di kantor-kantor, tetapi kegiatan melukis dilakukan untuk mengisi waktu kosong saja, tidak dijadikan kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan.
Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan)	Keterampilan dalam usaha industri dengan teknologi tinggi, dan kegiatan pertanian	Usaha-usaha industri belum ada, sedangkan kegiatan pertanian dan perkebunan sudah dilaksanakan pada unit kerja pertanian dalam Lapas, pertanian lengkong, pertanian dan peternakan Ngajum, unit kerja hortikultura, unit kerja budidaya jamur dan perikanan, peternakan ulat hongkong dan jangkrik.

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018

Kedua, penggunaan dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang. Seperti yang telah dijelaskan pada *input evaluation* bahwa anggaran yang ada untuk melaksanakan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang ini tidak banyak hanya berkisar pada jumlah 40 juta rupiah yang berasal dari dana DIPA yaitu bersumber dari APBN. Hal ini berkaitan dengan dana yang disalurkan pada masing-masing unit kerja. Pada Lapas Klas 1 Malang, anggaran untuk pelaksanaan Pembinaan Kemandirian dikelola oleh Seksi Sarana Kerja, yang nantinya untuk masing-masing unit kerja disalurkan dalam bentuk bahan-bahan yang dibutuhkan, bukan dalam bentuk dana.

Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Efendi, petugas unit kerja *handycraft*, “Kalau dana di bagiannya ke Pak Kusdaryanto di bagian sarana dan prasarana kerja. Kalau saya tugasnya hanya menyiapkan bahannya saja kalau dana dan biaya di bagian sarana kerja.”¹⁸ Meskipun menurut petugas dana yang dianggarkan tersebut sangat minim, berbeda dengan pernyataan dari narapidana sebagai pihak yang menggunakan sarana dan prasarana. Narapidana yang bekerja mengatakan bahwa sarana dan prasarana sudah cukup untuk menunjang kegiatan dan pekerjaan mereka di unit kerja. Narapidana yang bekerja di unit kerja mengatakan kekurangan sarana dan prasarana dapat diatasi dengan bagaimana mereka mensiasati kekurangan tersebut. Hal tersebut seperti yang dikatakan

¹⁸ Wawancara bersama Bapak Ahmad Efendi, Petugas Unit kerja *Handycraft*, 31 Juli 2018

Bagus, “Sarana prasaranna sudah menunjang, itu tergantung dari kita yang makai. Jadi bagaimana mengakalnya, bagaimana kita memanfaatkan yang ada.”¹⁹

Walaupun dari sarana dan prasarana telah digunakan dengan baik, terdapat unit kerja yang keberlanjutannya dilaksanakan dengan biaya pribadi dari petugas. Unit kerja tersebut adalah unit kerja pembuatan keset yang merupakan kegiatan wajib bagi tahanan yang baru ditetapkan menjadi narapidana untuk memukul serabut kelapa sebagai bahan untuk dijadikan keset. “Nggak ada anggarannya. Itu mandiri, dari saya sendiri, dijual-jual sendiri.”²⁰

Sebagai unit tertua dan sebagai unit kerja yang dijadikan pembinaan awal bagi narapidana baru menjadikan unit kerja pembuatan keset ini memiliki peran yang sangat penting. Dengan keberadaannya saat ini seharusnya anggaran juga diberikan. Pemerataan anggaran bagi setiap unit kerja diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Ketiga, pelaksanaan intervensi dengan pihak lain. Seperti yang telah di jelaskan pada sub-bab sebelumnya, pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan Lapas Klas 1 Malang dalam menunjang pelaksanaan Pembinaan Kemandirian sejak Juni 2017 hingga Juni 2018 yaitu BLKI Singosari dan Batik Blimbing Malang. Kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh Lapas tercantum dalam peraturan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁹ *Op.Cit.* Bagus

²⁰ Wawancara bersama Bapak Daryono, Petugas Unit Kerja Pembuatan Keset, 15 Agustus 2018

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tercantum bahwa kerjasama diselenggarakan untuk pengembangan, peningkatan dan perluasan pembinaan.²¹ Pelaksanaan kerjasama dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian menurut peraturan pemerintah tersebut termasuk dalam hubungan kerjasama untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas narapidana dalam hal keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi, sesuai dengan pasal 3 ayat 2 huruf h dan i.

Pelatihan dari Badan Latihan Kerja Industri (BLKI) Singosari selaku pihak ketiga dimulai pada bulan Juli 2017 lalu. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi WBP oleh BLKI Singosari di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Pada program BLKI tersebut telah disediakan berbagai macam kejuruan pelatihan bagi pencari kerja. Keturuan yang diadakan di Lembaga pemasyarakatan Klas 1 Malang adalah menjahit, otomotif, mesin dinamo dan servis alat listrik rumah tangga. Pelatihan ini dilaksanakan selama 240 jam dalam jangka waktu satu bulan yang diikuti oleh 64 peserta yang terbagi dalam empat kejuruan yang disediakan oleh BLKI.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja sama Penyelenggaraan pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 2

Gambar 5.2

Suasana Pelatihan dari BLKI Singosari



Sumber : Data Lapas Klas 1 Malang, 2018

Pelatihan ini tidak tercantum dalam rencana kerja tahunan Bidang Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang, namun merupakan suatu tindakan yang tepat apabila dikaitkan dengan minimnya anggaran yang diterima setiap tahunnya menurut pernyataan petugas. Krjasama dengan pihak ketiga ini dapat menambah kegiatan narapidana tanpa harus menganggarkan dana lebih. Namun setelah pelatihan tersebut selesai hingga tahun 2018 ini, belum ada keberlanjutan dari Lapas untuk kejuruan-kejuruan yang telah diajarkan oleh BLKI Singosari. Seperti yang dijelaskan oleh Pranoto, “Gak ada. Ya menjahit itu sih, tapi jahitan disini kan memang sudah ada sebelum ada pelatihan dari BLKI”²²

Selain itu adalah Batik Blimbing Malang, pihak ketiga yang juga memberikan pelatihan terhadap narapidana di Lapas Klas 1 Malang. Pelatihan ini

²² *Op.Cit*, Pranoto

diajarkan langsung dari Batik Blimbing Malang yang merupakan salah satu Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang. Keterampilan yang diajarkan kepada narapidana yakni, keterampilan batik tulis, batik cap dan batik *handycraft*. “Itu mulai 26 Mei kemarin. Itu nanti sampai 31 Agustus nanti”²³ Bapak Kusdaryanto, yang juga selaku pengelola kerjasama dengan pihak ketiga, menjelaskan ketika menjawab pertanyaan kapan tepatnya pelatihan membatik bagi narapidana ini dilaksanakan.

Gambar 5.3

Pembukaan dan Proses Pelatihan Membatik dari UKM Batik Blimbing Malang



Sumber: Dokumen Lapas Klas 1 Malang, 2018

Pelatihan ini merupakan realisasi dari rencana kerja tahun 2018 yaitu mengadakan pelatihan membatik dengan pihak ketiga. Dalam kalender kerja yang juga tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan 2018, Pelatihan membatik

²³ Wawancara bersama Bapak Kusdaryanto, Kepala Seksi Sarana Kerja dan Koordinator Unit Kerja Pembuatan Tempe, 2 Agustus 2018

dijadwalkan pada bulan Juni 2018, namun pelaksanaan diajukan pada bulan Mei 2018. Untuk memaparkan hasil dari pelatihan kerjasama dengan pihak ketiga, Lapas Klas 1 Malang seharusnya mengadakan laporan agar hasil dapat terlihat secara konkrit.

Keempat, adalah bagaimana Lapas Klas 1 Malang melaksanakan persiapan terhadap sumberdaya yang dimiliki dan juga narapidana yang akan dibina agar Pembinaan Kemandirian dapat berlangsung. Yang dimaksud sumber daya disini adalah petugas unit kerja yang memiliki fungsi membina narapidana di setiap unit kerja. Di Lapas Klas 1 Malang, petugas yang ditugaskan dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian ini terbilang kurang karena masih terdapat petugas yang merangkap lebih dari satu unit kerja bahkan di unit kegiatan pembinaan Lapas selain di kegiatan kerja. Seperti yang dikatakan Effendy,

“Pak Munif ini ahli dibidang pengelasan jadi beliau ditugaskan di pengelasan. Yang juga merangkap sebagai ustad di pesantren karena tenaganya sangat dibutuhkan di pesantren”²⁴

Hal serupa juga dialami oleh Daryono yang juga merangkap di dua unit kerja di Lapas Klas 1 Malang. “Nah kebetulan saya ini bertanggungjawab di keset dan di jahitan.”²⁵

Selain kurangnya petugas, pelatihan keterampilan bagi petugas unit kerja juga sangat minim. Bahkan dari beberapa petugas unit kerja mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan khusus sebagai petugas yang bertugas untuk bertanggung jawab di unit kerja. Seperti yang dikatakan Nawawi, petugas unit

²⁴ *Op.Cit*, Bapak Effendy Yulianto

²⁵ *Op.Cit*, Bapak Daryono

kerja jamur dan perikanan. “Gini, kalau masalah pelatihan jujur saya belum pernah mendapatkan pelatihan soal jamur dan perikanan.”²⁶ Hal yang sama juga dikatakan oleh Ahmad Efendi yang akrab disapa Pak Fendi,

“Tidak ada. Tapi sebelumnya kita ketika awal masuk sini dari awal menjadi pegawai LP, kita dapat pendidikan khusus untuk pengamanan atau *security* dan bagaimana membina mereka”²⁷

Namun, juga ada petugas yang mengikuti pelatihan secara pribadi untuk memberikan pelatihan kepada narapidana. Kusdaryanto, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Kerja yang juga petugas di unit pembuatan tempe di Lapas Klas 1 Malang mengikuti pelatihan membuat tempe di Sanan, sentra produksi tempe di Kota Malang. “Pribadi itu mbak, saya bayar sendiri. Saya sudah ikut pelatihan membuat tempe, membuat tahu juga bisa.”²⁸

Pendidikan yang didapatkan oleh petugas hanya sebatas pendidikan dasar sebagai petugas keamanan Lapas. Belum ada pendidikan khusus atau pelatihan yang diterima petugas yang ditugaskan di unit kerja, sehingga petugas belajar secara otodidak. Karena petugas Lapas merupakan pelaksana dari Pembinaan Kemandirian yang bermanfaat untuk meningkatkan *skill* narapidana, maka ilmu yang dimiliki petugas merupakan kunci dari berjalannya sebuah pembinaan. Sehingga, pelatihan bagi petugas, khususnya petugas yang bertugas memberikan pembinaan terhadap narapidana perlu mendapatkan pendidikan khusus di

²⁶ *Op.Cit*, Bapak Nawawi

²⁷ *Op.Cit*, Bapak Ahmad Efendi

²⁸ *Op.Cit*, Kusdaryanto

bidangnya. Seperti yang dikatakan Herdy, “Kalau yang ditugaskan di bengkel kerja itu harusnya iya (mendapatkan pelatihan).”²⁹

Narapidana dipersiapkan oleh Lapas Klas 1 Malang dengan memberikan *assesment* psikologi sejak ia ditetapkan sebagai narapidana oleh psikolog Lapas Klas 1 Malang. *Assesment* ini digunakan untuk mengarahkan narapidana kegiatan pembinaan apa yang cocok untuknya. Gatot menjelaskan mengenai *assesment* psikologi bagi narapidana,

“Jadi awal masuk sini jadi napa mereka itu diasesmen oleh psikolog. Nanti ada recordnya ada hasil asesmen itu apa. Setelah itu kita sidangkan, setelah itu baru di pilah-pilah di pembinaan kemandirian ada di pembinaan kepribadian.”³⁰

Selain mengadakan *assesment* untuk memilah narapidana agar sesuai dengan kondisi psikologis dari narapidana, untuk menginformasikan kepada narapidana adanya Pembinaan Kemandirian tentunya Lapas Klas 1 Malang memberikan sosialisasi terhadap narapidana. Sosialisasi terhadap narapidana ini diadakan pada saat Admisi Orientasi (AO) yaitu tahap orientasi bagi narapidana ketika berada di Lapas. Namun pelaksanaan AO sebagai tahap pengenalan kehidupan Lapas dilaksanakan secara bergantian, tidak selalu setelah ditetapkan, maka narapidana akan langsung menerima AO. Sehingga lebih sering narapidana mengetahui kegiatan pembinaan khususnya Pembinaan Kemandirian ini dengan sendirinya bukan dari sosialisasi.

²⁹ *Op.Cit*, Bapak Herdy

³⁰ *Op.Cit*, Pak Gatot

“Kalau sosialisasi ya ada waktu AO tapi sebelum saya diberisozialisasi di AO saya sudah ikut kerja disini. Karena AO itu ada angkataannya. Saya waktu itu angkatan ke berapa gitu.”³¹

Narapidana yang mengikuti kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang ini terhitung hanya sedikit dibandingkan dengan jumlah keseluruhan narapidana di Lapas tersebut. Lapas Klas 1 Malang tergolong Lapas yang *overload* yang ditinggali oleh jumlah total 2780 narapidana. Berdasarkan laporan bulanan Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang, jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan kerja ini tidak lebih dari sepersepuluh dari jumlah narapidana keseluruhan.

Bagan 5.1

Jumlah Peserta Unit Kegiatan Kerja



Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018

³¹ Op.Cit, Bagus

Dari bagan diatas, menunjukkan jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan Pembinaan Kemandirian. Dari jumlah keseluruhan narapidana yang mencapai 2000, tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang mengikuti Pembinaan Kemandirian. Pada periode Juni 2017 hingga Juni 2018 secara rata-rata yang mengikuti kegiatan ini hanya 4,6% dari jumlah keseluruhan narapidana. Hal ini dapat dikarenakan adanya narapidana yang telah selesai menjalani masa tahanan atau telah bebas. Selain itu juga ada narapidana yang memang tidak tertarik mengikuti kegiatan tersebut. Seperti pendapat dari Kus, narapidana yang belum mengikuti kegiatan pembinaan yang berencana ingin mengikuti kegiatan pesantren, ia tidak tertarik mengikuti kegiatan Pembinaan Kemandirian walaupun keterampilan yang didapatkan mampu diterapkan setelah bebas. “Ya kita cari kerja yang uangnya bisa dapat uang cepet *gak tau* pabrik atau apa *gitu*. Keset sepet begini saja paling ya *nggak* terlalu laku,...”³²

Kelima, pelaksanaan strategi pelaksanaan yang digunakan oleh pihak Lapas Klas 1 Malang dalam Pembinaan Kemandirian. Selama ini, Lapas Klas 1 Malang menerapkan strategi agar pembinaan berjalan dengan kondusif adalah dengan cara memberikan pendekatan kepada narapidana agar narapidana merasa tetap dimanusiakan sehingga pembinaan yang diberikan dapat dengan mudah dipahami oleh narapidana. Begitu pula pada pelaksanaan Pembinaan Kemandirian, petugas unit kerja juga menerapkan strategi pendekatan kepada narapidana yang menjadi peserta di unit kerja.

³² Wawancara bersama Kus, narapidana Lapas Klas 1 Malang, 23 Agustus 2018

Pada Keputusan Menteri Kehakiman yang dijadikan petunjuk pelaksanaan juga dijelaskan metode-metode yang dapat digunakan dalam melaksanakan Pembinaan Kemandirian.

- Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
- Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.³³

Seperti yang dilakukan oleh Fendi terhadap narapidana binaannya di unit kerja *handycraft*,

“Selama ini saya memotivasi mereka bekerja. Pertama saya *iming-imingi* kemudahan dalam mengurus keringanan masa hukuman seperti remisi PB terus CB itu. Kalau *gak* mau kerja dengan baik ikut kegiatan dengan baik, ya saya *gak* mau jadi walinya disini.”³⁴

Fendi juga menambahkan ia juga mengarahkan narapidana bahwa keterampilan yang didapat oleh narapidana dapat berguna bagi mereka sendiri untuk ke depannya. Hal ini termasuk dalam metode pendekatan secara persuasif edukatif karena memberikan pengaruh baik untuk membuat narapidana sadar akan pentingnya kegiatan Pembinaan Kemandirian sehingga mereka menjadi lebih rajin, yang akan membuat mereka lebih kompeten lagi pada keterampilan yang sedang dipelajarinya, dan hal ini akan sangat baik untuk kedepannya bagi narapidana.

³³ *Op.Cit*, Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990

³⁴ *Op.Cit*, Bapak Ahmad Efendi

Seperti yang dikatakan bahwa dengan mengikuti kegiatan dengan baik, maka akan mendapatkan kemudahan ketika mengurus PB, CB, CMB dan remisi atau pengurangan masa tahanan. Iming-iming tersebut bukan hanya sekedar iming-iming belaka agar narapidana rajin mengikuti kegiatan. Kegiatan pembinaan yang memang seharusnya diikuti oleh narapidana ini memang merupakan persyaratan kelulusan bagi narapidana sendiri.

Apabila narapidana setiap harinya mengikuti kegiatan ini dengan teratur, berkelakuan baik dan disiplin, maka narapidana akan dipermudah untuk mendapatkan kesempatan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) maupun Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan juga remisi atau pengurangan masa tahanan. Hal ini dikarenakan kegiatan sehari-hari narapidana akan dijadikan bahan penilaian dari petugas ketika narapidana mengajukan PB, CB atau CMB.

“...itu kan untuk keperluan mereka juga. Artinya begini, disini kan ada salah satu rapornya dia harus mengikuti pembinaan dalam lapas secara baik. Kalau dia tidak memenuhi berarti kan nilainya jelek. Nah, kalau nilainya jelek dia tidak bisa mengajukan program Pembebasan Bersyarat atau PB, tidak bisa mengajukan pengurangan masa pidana.”³⁵

Hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi narapidana agar mengikuti pembinaan dengan baik dan disiplin. Apabila mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik, maka penilaian yang diberikan juga akan baik. Apabila ia memiliki nilai yang baik maka akan semakin cepat pula ia kembali ke lingkungan masyarakat. Dengan adanya motivasi tersebut membuat pelaksanaan.

³⁵ *Op.Cit*, Bapak Gatot S Pratomo

Metode pendekatan yang dilakukan secara santai dan bersifat kekeluargaan oleh Lapas Klas 1 Malang, juga diterima dengan baik oleh narapidana yang mengikuti Pembinaan Kemandirian bahwa mereka juga merasa dihargai. Seperti yang dikatakan oleh Misnadi, narapidana di unit kerja pembuatan tempe,

“Ya enak (cara membina) *sih* mbak, kalo petugas sini enakan semua orangnya. Jadi seperti tidak membedakan. Karena kami disini, bukan berarti kita tidak sama dengan orang-orang di luar. Kita juga *diajarin*, diarahkan *kaya* gitu.”³⁶

Lapas Klas 1 Malang menggunakan dua metode dalam melakukan pendekatan dalam Pembinaan Kemandirian terhadap narapidana yaitu secara persuasif-edukatif dan pendekatan secara kekeluargaan. Kedua metode ini tercantum dalam petunjuk pelaksanaan, namun terdapat dua metode lain yang belum dilaksanakan yaitu pendekatan yang terencana dan sistematis, dan pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan.

Hal-hal yang telah dijelaskan diatas merupakan pelaksanaan dari apa yang tercantum pada *input evaluation* yang merupakan hal-hal yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan Pembinaan kemandirian. Dari *process evaluation* pada Pembinaan Kemandirian teradap narapidana di Lapas Klas 1 malang, tentunya terdapat hal yang baik yang mendukung pelaksanaan Pembinaan Kemandirian untuk tetap dilaksanakan, namun juga terdapat hal-hal yang perlu didiperbaiki untuk pelaksanaan Pembinaan kemandirian yang lebih baik lagi.

³⁶ Wawancara Misnadi, Narapidana, 2 Agustus 2018

3.4 *Product Evaluation*

Product evaluation digunakan untuk menentukan apakah program akan dilanjutkan atau tidak. *Product evaluation* mengidentifikasi hasil dari pelaksanaan baik hasil yang sesuai maupun tidak. Dari hasil tersebut akan dikaitkan dengan tujuan awal kebijakan. Evaluasi produk pada kebijakan Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Klas 1 Malang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaannya memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dari Pembinaan Kemandirian ini dilakukan di Lapas.

Hal-hal yang dibahas pada *product evaluation* ini salah satunya yaitu mengenai manfaat yang diterima oleh narapidana dengan mengikuti Pembinaan Kemandirian untuk mengetahui apakah tujuan diadakannya Pembinaan Kemandirian ini telah tercapai. Rudi, narapidana di unit kerja *handycraft* mengatakan bahwa dengan mengikuti kegiatan Pembinaan Kemandirian ia mendapatkan manfaat bahwa ia dapat meluangkan waktu kosongnya untuk bekerja sehingga mengurangi rasa bosan ketika berada di Lapas. “Yaa... Kesibukan itu aja *sih* mbak, biar gak jenuh *ndek* kamar *ae* (di kamar saja). Dapat ilmu baru juga gitu *kan* mbak”. Hal serupa juga dirasakan oleh Pranoto,

“...intinya itu pertama saya bisa ngurangi rasa jenuh, kalau diem-diem aja gak ada kerjaan biasanya kepikiran sama keluarga di rumah. Seenggaknya kalau ada kegiatan gini bisa berkurang beban pikiran,”³⁷

Manfaat lain dari Pembinaan Kemandirian yang dirasakan oleh narapidana adalah ketika mereka mendapatkan permintaan produksi. Berikut ini tanggapan narapidana mengenai adanya permintaan produksi dari konsumen.

³⁷ *Op.Cit.*Pranoto

“...saya merasa kalau hasil kerja saya ini juga ada yang minat, diminati banyak orang gitu”³⁸ Hal tersebut diungkapkan oleh Misnadi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bagus, “Ya senang sih bisa dipercaya oleh orang untuk buat seperti ini, bisa meningkatkan skill juga.”³⁹

“... saya dapat pengalaman dengan ikut kegiatan ini ya kalau misalnya nanti mau saya terapkan sendiri di rumah, kan saya sudah tau harus seperti apa supaya berhasil karena sudah sering saya kerjakan disini”⁴⁰

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pranoto yang tertarik untuk menerapkan ilmu dan pengalaman kerja yang telah didapatkan di Lapas Klas 1 Malang, ketika sudah berada di luar Lapas Klas 1 Malang. Beberapa pendapat diatas mengenai manfaat yang didapatkan narapidana telah sesuai dengan tujuan dari Pembinaan Kemandirian pada poin keberhasilan dalam memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya. Seperti Pranoto yang mengatakan ingin menerapkan keterampilan yang sudah didapatkan saat sudah selesai menjalani hukuman, juga Misnadi dan Bagus yang merasa senang karyanya diminati dan dipercaya oleh orang lain. Hal ini menunjukkan mereka telah memantapkan harga diri dan kepercayaan dirinya kembali dalam hidup bermasyarakat.

Pada poin tujuan Pembinaan Kemandirian yang lain yaitu berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional, manfaat yang dirasakan oleh narapidana juga menunjukkan kesesuaian. Hal ini ditunjukkan dengan

³⁸ *Op.Cit*, Misnadi

³⁹ *Op.Cit*, Bagus

⁴⁰ *Op.Cit*, Pranoto

pendapat Rudi yang mengaku selain memiliki kesibukan dengan kegiatan Pembinaan Kemandirian, ia juga mendapatkan ilmu baru. Hal serupa juga ditunjukkan pada pendapat Panoto yang mengatakan ingin menerapkan keterampilannya karena sudah mengetahui bagaimana cara kerja dari keterampilan yang didapatkan di unit kerja budidaya jamur yang ia ikuti.

Selanjutnya hal yang akan diidentifikasi setelah kesesuaian manfaat dengan tujuan adalah mengenai pelaksanaan unit bimbingan kerja. Pelaksanaannya didasari dengan Keputusan Menteri Kehakiman sebagai petunjuk pelaksanaan dan rencana kerja tahunan untuk pedoman hal apa sajakah yang harus dilaksanakan dalam Pembinaan kemandirian setiap tahunnya. Pelaksanaan bimbingan kerja berdasarkan rencana kerja dan keputusan menteri telah dilaksanakan tetapi terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan. Yang telah dilaksanakan adalah pembuatan laporan bulanan yang rutin setiap bulannya.

Kemudian upah atau premi yang diberikan terhadap narapidana sebesar 10% dari hasil penjualan hasil produksi sebagai jasa untuk narapidana yang mengerjakan. “Alhamdulillah kita pesenannya ada terus. Kalau ada pesanan kan kita nanti dapat premi, makin banyak pesenan ya makin banyak juga dapatnya.”⁴¹ Namun premi untuk narapidana tidak selalu diberikan dalam bentuk uang. Seperti yang dikatakan oleh Nawawi, premi yang seharusnya didapatkan narapidana di unit jamur dan perikanan jumlahnya terbilang kecil sehingga dikumpulkan dan digunakan untuk mengadakan makan bersama, atau sekedar *ngopi* bersama.

⁴¹ Wawancara bersama Sugianto, Narapidana, 15 Agustus 2018

Hal yang telah dilaksanakan lainnya yaitu pelatihan-pelatihan yang tertera pada rencana kerja tahunan. Selain itu adalah kesesuaian unit kerja dengan jenis-jenis keterampilan yang telah ditetapkan pada petunjuk pelaksanaan yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990. Selain telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, Lapas Klas 1 Malang juga memiliki unit-unit kerja yang beraga, seperti yang dikatakan oleh pihak dari Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Timur mengenai Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang,

“Kalau di Lapas Malang itu kan bengkel kerjanya banyak ya. Sudah berjalan baik ya, karena sejak saya masuk kerja disini, itu produknya ya masih berjalan kan sampai sekarang seperti kerajinan tangan, bengkel las, bengkel cat itu kan”⁴²

Meskipun pada kenyataannya terdapat jenis keterampilan yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan di Lapas Klas 1 Malang, hanya saja belum dijadikan sebagai unit kerja.

Kekurangan yang ada pada pelaksanaan unit bimbingan kerja misalnya adalah adanya unit kerja yang tidak ada keberlanjutannya seperti unit kerja pembuatan tusuk sate yang tidak lagi dicantumkan pada laporan bulanan yang menunjukkan unit kerja tersebut sudah tidak aktif. Hal tersebut merupakan sebuah kegagalan dalam melaksanakan rencana kerja untuk memberikan kegiatan kepada narapidana karena narapidana tidak memiliki kegiatan lagi karena unit sudah tidak aktif. Namun hal ini tidak menjadi permasalahan karena hal ini memang sering terjadi di setiap Lapas karena kurangnya peminat dan pekerja. Kekurangan

⁴²*Op.Cit.* Bapak Herdy Pramono

selanjutnya yaitu seperti yang telah dikatakan sebelumnya yaitu terdapat jenis keterampilan yang sebenarnya ada di Pembinaan kemandirian Lapas Klas 1 Malang, tetapi belum diwujudkan dalam bentuk unit kerja.

Hal yang diidentifikasi lainnya dalam *product evaluation* ini yaitu penggunaan dana untuk Pembinaan Kemandirian. Dana DIPA yang disalurkan ke Lapas, untuk Pembinaan Kemandirian sendiri jumlahnya terbilang sedikit. Dapat dikatakan demikian karena pembagian untuk pemenuhan sarana di unit kerja belum merata. Ditunjukkan dengan Petugas yang mengatakan bahwa pelaksanaan unit kerja pembuatan keset yang dibiayai secara mandiri oleh petugas. Meskipun hasil yang didapatkan dikembalikan kepada petugas sendiri, hal ini seharusnya tidak terjadi karena unit kerja merupakan tanggung jawab dari Lapas yang ditujukan untuk narapidana sehingga seharusnya Lapas yang menanggung biaya pelaksanaan unit kerja.

Dalam *product evaluation* juga diidentifikasi mengenai pelaksanaan intervensi dengan pihak ketiga. Intervensi yang dilakukan oleh Lapas Klas 1 Malang yaitu kerjasama dalam hal pelatihan keterampilan bagi narapidana dengan BLKI Singosari dan UKM Batik Blimbing Malang. Kerjasama dalam hal pelatihan bagi narapidana ini dapat dijadikan solusi dari dana yang dikatakan minim oleh petugas. Dengan adanya pelatihan dari pihak ketiga ini, akan mengurangi biaya yang dikeluarkan sehingga dana lebih dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian. Pada Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Klas 1 Malang, keberlanjutan dari pelatihan belum ada. Misalnya saja pelatihan dari BLKI

Singosari yang dilaksanakan pada bulan Juli 2017 belum ada tindaklanjut dari Lapas untuk dijadikan unit kerja. Padahal dengan menindak pelatihan tersebut menjadi unit kerja di Lapas Klas 1 Malang, akan menimbulkan dampak yang lebih baik, dimana narapidana dapat melatih kembali keterampilannya tanpa harus menunggu adanya pelatihan lagi dari pihak yang sama, sehingga keterampilannya semakin terasah. Hal ini akan mendukung tujuan Pembinaan Kemandirian yakni narapidana yang berhasil mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk hidup mandiri di masyarakat.

Selanjutnya adalah mengenai narapidana dan petugas pembina di Lapas Klas 1 Malang sendiri. Mengenai narapidana, dalam mempersiapkan dilakukan *assessment* dan juga sosialisasi bagi narapidana. Kedua hal tersebut akan mempermudah Lapas Klas 1 Malang untuk membina narapidana karena terdapat laporan dari *assesment* sebagai pedoman bagi Pembina dan sosialisasi membuat narapidana setidaknya mengerti apa yang dilaksanakan pada Pembinaan Kemandirian. Namun jumlah narapidana hanya sedikit dan jumlah narapidana setiap bulannya terbilang stagnan, padahal bagan pertambahan jumlah narapidana menunjukkan setiap bulannya narapidana selalu bertambah. Hal ini dapat dikarenakan narapidana yang kurang tertarik pada kegiatan dan kurangnya sosialisasi mengenai manfaat yang akan didapatkan dengan mengikuti Pembinaan Kemandirian. Dengan mensosialisasikan mengenai manfaat yang didapatkan dengan mengikuti kegiatan Pembinaan Kemandirian, narapidana akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan tersebut karena manfaat yang akan didapatkannya.

Selain narapidana adalah mengenai petugas selaku Pembina di Lapas Klas 1 Malang. Lapas Klas 1 Malang belum mempersiapkan dengan baik dalam hal petugas yang memiliki tugas dan fungsi sebagai orang yang memberikan bimbingan di unit kerja. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa belum ada pelatihan bagi petugas unit kerja, yang seharusnya diadakan karena petugas unit kerja yang akan memberikan bimbingan bagi narapidana. Sebagai aktor yang berperan sebagai pembimbing, seharusnya aktor tersebut telah memiliki bekal keterampilan terlebih dahulu yang akan diberikan kepada penerima bimbingan. Sehingga pelatihan keterampilan bagi petugas unit kerja di Lapas merupakan hal pokok yang harus dilaksanakan. Hal ini tentunya berkaitan dengan pemenuhan tujuan inti dari Pembinaan Kemandirian dalam memberikan keterampilan kepada narapidana, dimana keterampilan itu diberikan di unit-unit kerja yang merupakan tanggung jawab dari petugas unit kerja. Selain itu, jumlah petugas yang kurang juga menghambat pencapaian tujuan.

Selain narapidana dan petugas unit kerja, hal lain yang diidentifikasi yaitu metode pelaksanaann Pembinaan Kemandirian. Metode-metode yang telah digunakan oleh petugas Lapas Klas 1 Malang dalam Pembinaan Kemandirian sesuai dengan metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian, yaitu metode pendekatan secara kekeluargaan kepada narapidana dan metode pendekatan secara persuasif-edukatif. Dua metode lainnya yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan yaitu pendekatan secara terencana dan sistematis, dan pemeliharaan dan peningkatan keamanan, masih belum digunakan pada Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang. Kedua pendekatan yang

digunakan diterima oleh narapidana dengan baik, hal ini menunjukkan hasil pelaksanaan pendekatan yang baik.

Seharusnya pendekatan secara terencana dan sistematis juga dilakukan dengan cara setiap unit kerja membuat rencana kerja yang akan dilakukan di masing-masing unit kerja agar lebih terencana apa yang harus dilakukan kedepannya namun dari unit kerja belum menerapkan rencana kerja yang khusus untuk unit kerja. Pemeliharaan keamanan sangat penting dilakukan pada pelaksanaan Pembinaan Kemandirian karena pada unit kerja tentunya terdapat peralatan-peralatan yang digunakan narapidana untuk bekerja, apabila pengamanan kurang, maka peralatan-peralatan tersebut dapat menjadi benda yang membahayakan. Seharusnya setiap unit kerja memberlakukan pemeriksaan kepada narapidana ketika telah selesai jam kegiatan di unit kerja agar peralatan-peralatan tidak sampai keluar dari ruangan kegiatan kerja. Apabila dua metode pendekatan yang lain juga dilaksanakan maka akan lebih baik lagi.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab di atas, bab ini merupakan kesimpulan dan rekomendasi mengenai skripsi tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang telah dilakukan oleh penulis.

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian evaluasi yang menggunakan teori evaluasi milik Daniel L. Stufflebeam pada pelaksanaan Pembinaan Kemandirian terhadap narapidana di Lapas Klas 1 Malang, telah dilakukan evaluasi dari *context-input-process-product*. Konteks menjabarkan mengenai tujuan utama diadakannya Pembinaan Kemandirian, input menjabarkan hal-hal apa yang dipersiapkan dalam pelaksanaan, proses menjabarkan mengenai pelaksanaan dari hal-hal yang telah dipersiapkan tersebut, dan product adalah menjabarkan identifikasi hasil dari pelaksanaan Pembinaan Kemandirian, hal apa yang telah sesuai dengan tujuan dan hal apa yang belum sesuai dengan tujuan dari Pembinaan Kemandirian.

Beberapa hal yang dapat dikatakan telah sesuai dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian yaitu pelaksanaan Pembinaan Kemandirian yang telah sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah dibuat mulai dari pembuatan laporan bulanan yang rutin dilaksanakan, pelaksanaan unit kegiatan kerja yang bervariasi dan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan, pemberian premi kepada narapidana yang produktif di unit kerja, hingga rencana-

rencana pelatihan yang telah terlaksana. Selanjutnya adalah metode pendekatan yang digunakan oleh petugas Lapas Klas 1 Malang dapat diterima dengan baik oleh narapidana. Manfaat yang diterima narapidana dengan mengikuti Pembinaan Kemandirian juga telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pada petunjuk pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Dari evaluasi yang telah dilakukan dalam empat tahap CIPP ini, terdapat pula hal-hal yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang. Hal yang menjadi kekurangan yaitu pertama, terdapat keterampilan yang dilaksanakan di Lapas tetapi belum dibentuk menjadi sebuah unit kerja sehingga narapidana dengan keterampilan tersebut membiayai secara pribadi seperti servis elektronik dan pengembangan bakat melukis. Kedua yaitu dana pembinaan yang dianggarkan kurang adanya pemerataan, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya unit kerja yang belum tercover dan dibiayai secara pribadi oleh petugas. Ketiga adalah mengenai petugas unit kerja yang kurang jumlahnya dan belum pernah mendapatkan pelatihan keterampilan khusus untuk Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan terhadap narapidana merupakan hal yang wajib dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan Kemandirian merupakan pola pembinaan yang harus dilaksanakan di setiap Lapas disamping Pembinaan Kepribadian sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana. Dengan adanya hal-hal yang telah sesuai dengan tujuan dan

masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang, sebaiknya kegiatan dalam Pembinaan Kemandirian tetap dilanjutkan pelaksanaannya, namun dengan memaksimalkan kembali pelaksanaannya yang telah sesuai dengan tujuan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam pelaksanaannya.

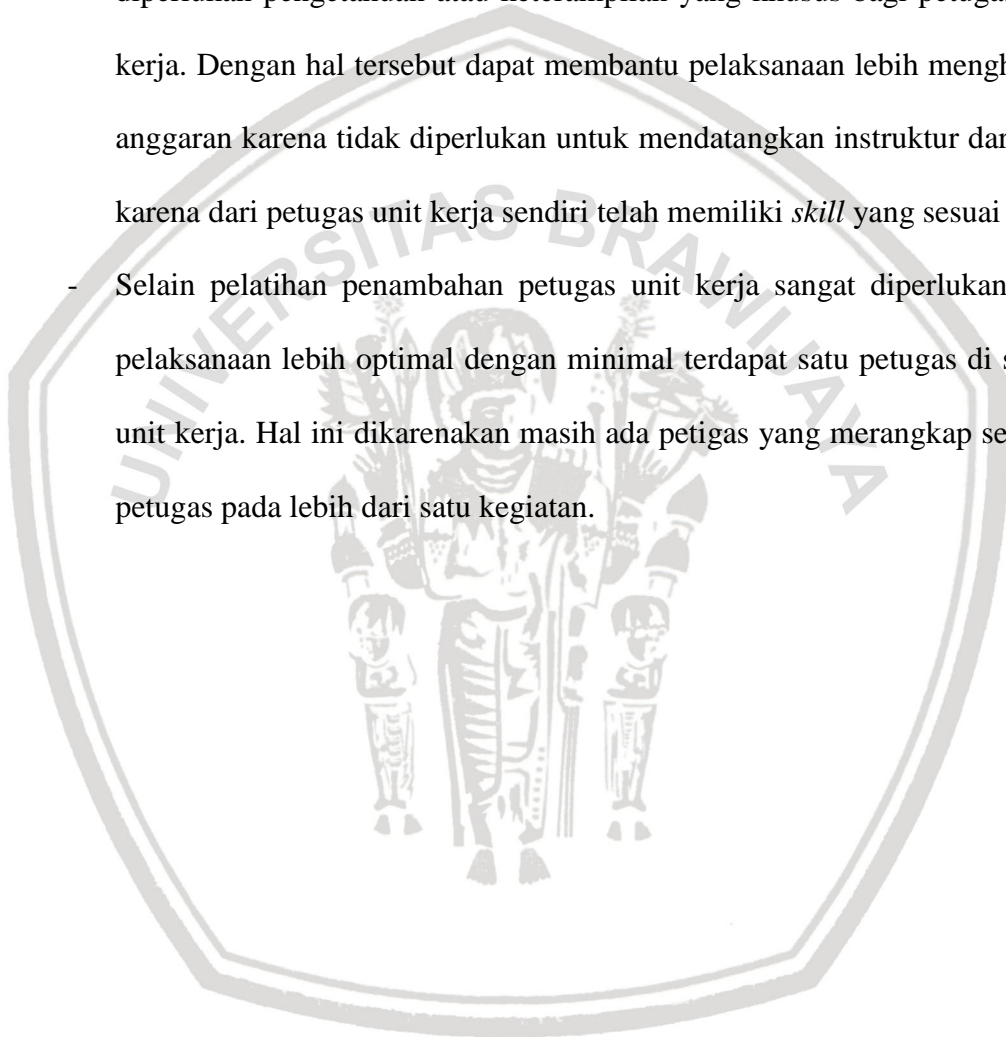
6.2 Rekomendasi

Rekomendasi berisi saran dari penulis terkait hasil temuan penelitian di lapangan dalam proses penulisan skripsi. Dalam hal ini penulis mempunyai rekomendasi untuk Lapas Klas 1 Malang khususnya Bidang Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang

- Penggunaan anggaran dana untuk Pembinaan Kemandirian di Lapas Klas 1 Malang dikatakan belum tepat karena pembagian anggaran dana yang digunakan untuk mengcover kebutuhan di setiap unit kerja belum merata karena adanya unit kerja yang dibiayai pribadi oleh petugas. Sehingga perlu adanya pemerataan dalam pembagian dana untuk pembiayaan karena terdapat unit kerja yang tidak dibiayai menggunakan anggaran yang ada.
- Selanjutnya adalah mengenai pihak ketiga yang menjalin MoU dengan Lapas Klas 1 Malang. MoU yang diadakan berupa pelatihan yang baru bagi narapidana di Lapas Klas 1 Malang. Perlu adanya tindak lanjut dari Lapas dalam hal pengadaan unit kerja dari pelatihan yang pernah diajarkan oleh pihak ketiga. Hal ini akan lebih baik karena terdapat kesinambungan

yang menjadikan narapidana mampu meningkatkan dan mengasah kembali *skill* yang telah didapatkan selama pelatihan dengan pihak ketiga.

- Pelatihan terhadap petugas unit kerja diperlukan karena petgas unit kerja memiliki tugas dan fungsi memberikan binaan di unit kerja sehingga diperlukan pengetahuan atau keterampilan yang khusus bagi petugas unit kerja. Dengan hal tersebut dapat membantu pelaksanaan lebih menghemat anggaran karena tidak diperlukan untuk mendatangkan instruktur dari luar karena dari petugas unit kerja sendiri telah memiliki *skill* yang sesuai
- Selain pelatihan penambahan petugas unit kerja sangat diperlukan agar pelaksanaan lebih optimal dengan minimal terdapat satu petugas di setiap unit kerja. Hal ini dikarenakan masih ada petigas yang merangkap sebagai petugas pada lebih dari satu kegiatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku, Skripsi dan Jurnal

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Alviani, Ni Made Destriana. 2015. *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar*. Skripsi. Universitas Udayana
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, C. . 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Budi A, Sartika. 2013. *Evaluasi Model Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang
- C.I, Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan
- Dwi, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ernawati. 2016. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza BandarJaya, Lampung Tengah*. Skripsi. Universitas Lampung
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Herma, Yossy. 2011. *Evaluasi Program Raskin di Kota Semarang (Studi Kasus : Di Kelurahan Pedurungan Kidul*. Skripsi. Universitas Diponegoro
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muyasaroh dan Handoyo, Pambudi. 2014. *Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran atau Pencuri*. Jurnal Paradigma. Vol. 2. No. 3
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Putri, Esti Hartyanti, Soeady, Moch. Saleh, Hayat, Ainul. *Evaluasi Kebijakan Peremajaan Angkutan Kota Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan*

- Publik (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik. Vol.3. No.1*
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Rahmadika, Firanda. 2016. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana (Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang)*. Skripsi. FISIP Universitas Brawijaya.
- Stufflebeam, Daniel L. dan Coryn, Chris L. S.. 2014. *Evaluation Theory, Models and Applications, 2nd edition*. San Fransisco: Jossey Bass
- Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan. 2017. *Statistik Kriminal 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Sumarsono, HM. Sonny. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat
- Yuliani, Putri Anisa. 2014. *Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIA Jakarta*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Jakarta

Produk Hukum

- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja sama Penyelenggaraan pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/evaluasi>, Diakses pada 1 April 2018, pukul 20.50

Malangtimes.com, 2015, *Prestasi Lapas Lowokwaru Jadi Motivasi Pemimpin Lowokwaru Jadi Motivasi Pemimpin Baru*, <http://m.malangtimes.com/baca/6082/20151109/192045/prestasi-lapas-lowokwaru-jadi-motivasi-pemimpin-baru/> Diakses pada 2 Januari 2018, jam 15.00

Malangtimes.com, 2017, *Wacanakan Jadi Lapas Wisata, Pondok Asimilasi Ngajum Berbenah*, <http://www.malangtimes.com/baca/18177/20170425/144510/wacanakan-jadi-lapas-wisata-pondok-asimilasi-ngajum-berbenah/>, Diakses pada 23 Mei 2018, pukul 09.30

lapasmalang.com, <http://lapasmalang.com/index.php/profil/visi-misi>, diakses 2 Agustus 2018, pukul 17.00

Lain-lain

Laporan Bulanan Bimbingan Kerja Narapidana Lapas Klas 1 Malang

Rencana Kerja Bidang Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang 2017

Rencana Kerja Bidang Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang 2018

Wawancara dengan Eko, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30

Wawancara bersama Bapak Herdy Pramono, Staff Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM. 2 Juli 2018

Wawancara bersama Bapak Effendy Yulianto, Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Klas 1 Malang. 20 Juli 2018

Wawancara bersama Bapak Gatot S Pratomo, Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lapas Klas 1 Malang, 20 Juli 2018

- Wawancara bersama Bagus, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. 31 Juli 2018
- Wawancara bersama Ismail, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. 23 Agustus 2018
- Wawancara bersama Rudi, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. 31 Juli 2018
- Wawancara bersama Pranoto, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. 9 Agustus 2018
- Wawancara bersama Bapak Nawawi, Petugas Unit Kerja Budidaya Jamur dan Perikanan. 9 Agustus 2018
- Wawancara bersama Bapak Ahmad Efendi, Petugas Unit kerja *Handycraft*. 31 Juli 2018
- Wawancara bersama Bapak Daryono, Petugas Unit Kerja Pembuatan Kaset. 15 Agustus 2018
- Wawancara bersama Bapak KUSDARYANTO, Kepala Seksi Sarana Kerja dan Koordinator Unit Kerja Pembuatan Tempe. 2 Agustus 2018
- Wawancara bersama Kus, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. 23 Agustus 2018
- Wawancara Misnadi, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. 2 Agustus 2018
- Wawancara bersama Sugianto, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. 15 Agustus 2018